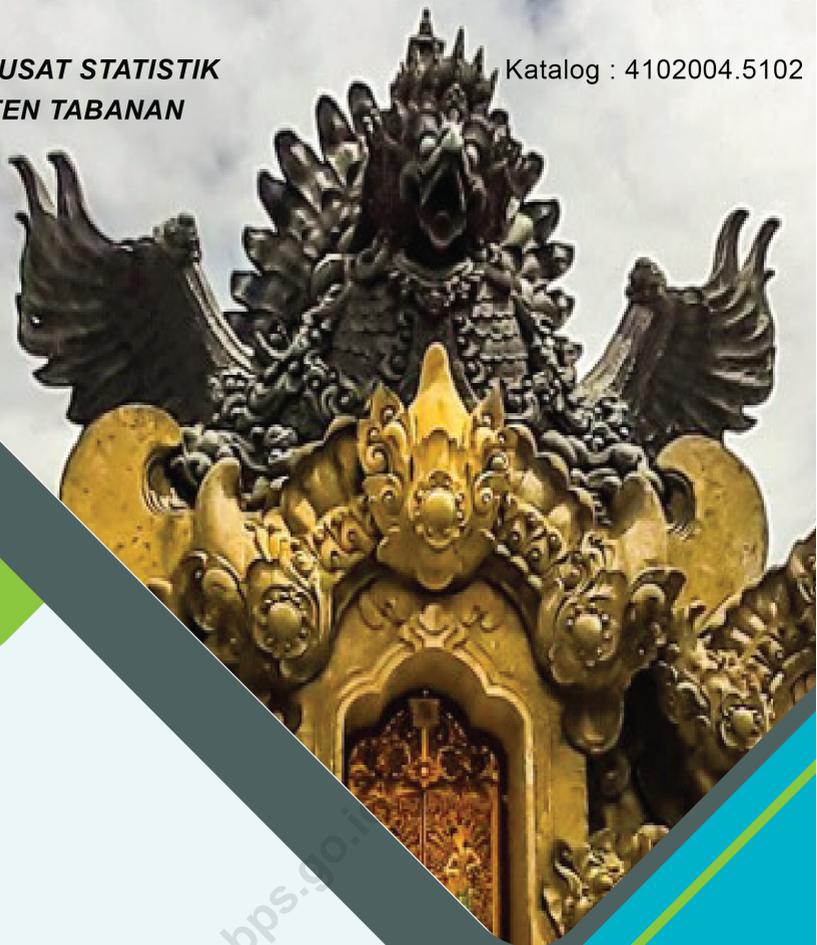




**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TABANAN**

Katalog : 4102004.5102



**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
KABUPATEN TABANAN**

2021



<https://tabanan>

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
KABUPATEN TABANAN**

2021





INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TABANAN 2021

No. ISBN :
No. Publikasi : 51020.2118
No. Katalog BPS : 4102004.5102
Ukuran Buku : 14,80 x 21,00 cm
Jumlah Halaman : xiv + 96 Halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan
Penyunting : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan
Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan
Diterbitkan oleh : ©Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan
Dicetak oleh : UD Astari
Sumber Gambar : *Freepik.com*

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



TIM PENYUSUN

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN TABANAN
2020**

Penanggung Jawab Umum :

Indra Susilo, DP.Sc. MM.

Penanggung Jawab Teknis :

Rudi Purwanto, SE

Editor :

Rudi Purwanto, SE

Penulis :

Desak Gede Pratiwi Wijayanti, S.Si



<https://tabanankab.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Publikasi “**Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tabanan 2021**” dapat tersusun. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan.

Publikasi ini menyajikan data dasar tentang kesejahteraan rakyat Kabupaten Tabanan. Data dasar yang dicakup dalam publikasi ini meliputi tujuh bidang yakni kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, perumahan, serta sosial ekonomi. Data yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), serta data sekunder yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif terhadap publikasi ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyajian publikasi di masa mendatang.

Tabanan, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tabanan,



Indra Susilo, DP.Sc.M.M.
NIP. 19640607 198702 1 001



<https://tabanankab.bps.go.id>



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xi
Bab I Kependudukan	1
Bab II Kesehatan	17
Bab III Pendidikan	31
Bab IV Angkatan Kerja	43
Bab V Pola Konsumsi	54
Bab VI Perumahan	63
Bab VII Sosial Ekonomi Lainnya	83
Daftar Pustaka	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan, 2019-2021.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio di Kabupaten Tabanan, 2016-2021.....	9
Tabel 1.3	Angka Beban Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) di Kabupaten Tabanan 2021	11
Tabel 2.1	Angka Morbiditas Penduduk Tabanan Menurut Jenis Kelamin 2018 - 2020.....	21
Tabel 2.2	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tabanan 2018 - 2020.....	25
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB yang Dimiliki di Kabupaten Tabanan 2020	36
Tabel 3.2	Angka Melek Huruf Penduduk menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Tabanan 2019-2021.....	38
Tabel 4.1	Karakteristik Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Tabanan 2018 – 2020.....	47
Tabel 4.2	Penduduk yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Tabanan, 2021.....	50
Tabel 4.3	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan 2021.....	52
Tabel 5.1	Distribusi Pendapatan di Kabupaten Tabanan 2015 – 2020.....	60



Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas 2018 - 2020.....	70
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Tabanan 2018 - 2020.....	73
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Tabanan 2018 – 2020.....	78
Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Sejahtera (Rastra) dan Jumlah Beras yang Dibeli/Diterima di Kabupaten Tabanan 2020.....	86
Tabel 7.2	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Kredit Usaha di Kabupaten Tabanan 2020.....	87
Tabel 7.3	Persentase Rumah Tangga Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) menurut Jenis PIP yang Diterima di Kabupaten Tabanan 2020.....	89



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Tabanan 2016-2021.....	5
Grafik 1.2	Piramida Penduduk di Kabupaten Tabanan 2021	7
Grafik 1.3	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kabupaten Tabanan 2020.....	13
Grafik 1.4	Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Ke Atas menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Tabanan 2020.....	16
Grafik 2.1	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15— 49 Tahun Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Proses Persalinan di Kabupaten Tabanan 2018-2020.....	23
Grafik 2.2	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dan Tempat Tempat Berobat di Kabupaten Tabanan 2020.....	26
Grafik 2.3	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tabanan 2020....	28
Grafik 3.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5-18 Tahun menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tabanan 2020.....	35
Grafik 3.2	Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tabanan 2020	40
Grafik 3.4	Rasio Murid terhadap Guru di Kabupaten Tabanan 2018-2020.....	41



Grafik 4.1	TPAK dan TPT menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan 2021.....	48
Grafik 5.1	Perkembangan Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan di Kabupaten Tabanan 2018-2020.....	58
Grafik 5.2	Perkembangan Pola Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Tabanan 2018 - 2020.....	60
Grafik 6.1	Kualitas Perumahan di Kabupaten Tabanan 2018-2020	66
Grafik 6.2	Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per Kapita (m ²) di Kabupaten Tabanan 2018 - 2020	68
Grafik 6.3	Jumlah Rumah Tangga Pelanggan Listrik PLN 2016-2020.....	71
Grafik 6.4	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung/Tidak dan Mata Air Terlindung/Tidak menurut Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Kabupaten Tabanan 2016 – 2020.....	75
Grafik 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Tabanan, 2018-2020.....	77
Grafik 6.6	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan 2018 – 2020.....	80



Grafik 6.7	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer dan Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan 2020	81
Grafik 7.1	Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Aset menurut Jenis Kepemilikan Aset di Kabupaten Tabanan 2020	90
Grafik 7.2	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan dalam Periode 1 Januari—31 Desember 2018 menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan 2020.....	92

<https://tabanankab.bptsp.go.id>



<https://tabanankab.bps.go.id>

<https://tabanankab.bps.go.id>

- 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
- 1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk
- 1.3 Angka Beban Ketergantungan
 - 1.4 Status Perkawinan
 - 1.5 Umur Perkawinan Pertama

Kependudukan

INFOGRAFIS KESEJAHTERAAN RAKYAT BPS KABUPATEN TABANAN

Jumlah penduduk Kabupaten
Tabanan pada tahun 2021 sebesar
451.587 jiwa
dengan laju pertumbuhan
penduduk sebesar
0,53 persen



KEPENDUDUKAN



Adapun angka beban ketergantungan di
Kabupaten Tabanan sebesar

42,83%

yang berarti setiap 100 orang berusia produktif,
akan memiliki tanggungan sebanyak 43 orang
yang belum produktif dan dianggap tidak
produktif lagi

Sex ratio di Kabupaten Tabanan sebesar

98,56%

yang berarti dari 100 penduduk perempuan,
terdapat 99 penduduk laki-laki



Sumber: Proyeksi Penduduk Bali 2015-2025 Hasil Supas

Arah kebijakan dan kerangka pembangunan nasional pada umumnya dilandasi oleh pemikiran bahwa kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis. Penduduk tidak saja berperan sebagai subyek pembangunan, tetapi juga menjadi obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sementara sebagai obyek, pembangunan yang dilakukan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan tersebut.

Keadaan penduduk yang ada saat ini, sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diimbangi dengan kualitas penduduk yang memadai, akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang kurang mumpuni, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan. Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal dan lainnya penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia. Pembangunan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan sumber daya manusia menuju Tabanan yang sejahtera, aman, dan berprestasi menjadi target utama. Tersedianya manusia yang berkualitas, bermoral, dan mau berpikir untuk kemajuan Tabanan akan mendorong program pembangunan dapat berjalan sesuai harapan. Oleh



Kependudukan

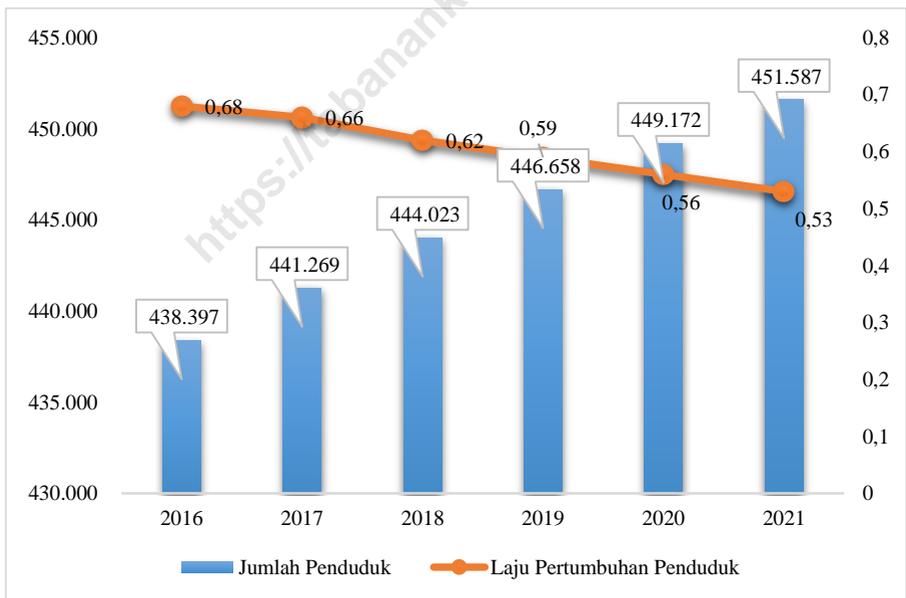
sebab itu, dalam menangani permasalahan penduduk, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk yang besar, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta penduduk yang berkualitas dan tersebar merata di seluruh wilayah. Berbagai aspek yang menyangkut kependudukan seperti laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin merupakan indikator pokok yang akan dibahas pada bab ini.

1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan salah satu indikator kependudukan yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dan tidak terkendali akan mengakibatkan beban pembangunan semakin berat. Apabila pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding dengan pertumbuhan ekonomi, akan menimbulkan berbagai permasalahan di bidang lain. Misalnya peningkatan angka pengangguran karena tidak dapat terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya, kesejahteraan penduduk menurun dan angka kriminalitas meningkat. Oleh karena itu, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk harus dilakukan secara berkesinambungan. Begitu pula sebaliknya, pertumbuhan penduduk yang terlalu rendah juga akan menjadi masalah tersendiri karena akan menyebabkan kekurangan sumber daya manusia. Penduduk suatu wilayah merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk mendukung pencapaian pembangunan demi kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa yang tersebar di 34 provinsi. Penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sekitar 56 persen. Tercatat hanya tiga persen penduduk tinggal di kawasan Maluku dan Papua. Bali dan Nusa Tenggara merupakan kawasan dengan penduduk terendah kedua yang mencapai enam persen penduduk Indonesia. Tercatat 4.317.404 penduduk tinggal di Pulau Dewata pada tahun 2020, 11 persen diantaranya tinggal di Tabanan.

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tabanan 2016-2021



Sumber : Proyeksi Penduduk Bali 2015-2025 Hasil Supas

Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 mencapai 451.587 jiwa. Sementara laju pertumbuhan penduduk Tabanan sebesar 0,53 persen, menurun 0,03 poin dibanding tahun sebelumnya (Lihat Grafik 1.1). Apabila dicermati, dalam kurun waktu enam tahun terakhir, jumlah penduduk Tabanan selalu meningkat. Namun, laju pertumbuhan penduduknya cenderung menurun. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak terlalu tajam sehingga pertumbuhan jumlah penduduk tetap terkendali.

Tabel 1.1. Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan, 2019-2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-Laki	221.832	223.019	224.155
Perempuan	224.826	226.153	227.432
Tabanan	446.658	449.172	451.587

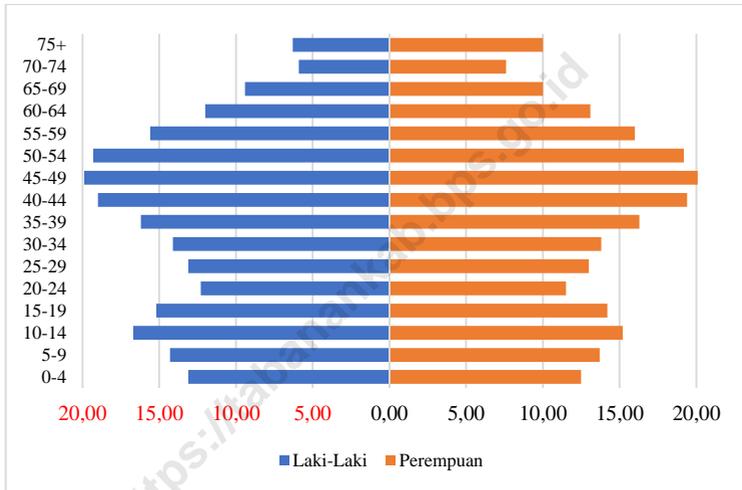
Sumber : Proyeksi Penduduk Bali 2015-2025 Hasil Supas

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tercatat jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 446.658 jiwa, tahun 2020 sebesar 449.172 jiwa dan tahun 2021 sebesar 451.587 jiwa. Dari tahun 2019 sampai dengan 2021 tercatat jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Baik jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Struktur penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari nilai Sex Ratio/ Rasio Jenis Kelamin (RJK). Nilai tersebut menunjukkan terkait

perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data ini sangat berguna dalam pembangunan berbasis gender.

Grafik 1.2 Piramida Penduduk di Kabupaten Tabanan 2021



Sumber : Proyeksi Penduduk Bali 2015-2025 Hasil Supas

Dilihat dari bentuk piramida penduduk, komposisi penduduk Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 bersifat stasioner. Bentuk piramida seperti ini menggambarkan bahwa tingkat kelahiran hampir sama dengan tingkat kematian. Pertumbuhan penduduk cenderung tetap. Hal ini disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tidak begitu tinggi, demikian pula dengan angka kematian yang relatif rendah. Perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan dewasa juga relatif seimbang. Dominannya penduduk yang berada pada usia produktif menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Tabanan. Tinggal bagaimana memanfaatkan Sumber Daya



Kependudukan

Manusia (SDM) yang ada sehingga menjadi pendorong bagi kemajuan Kabupaten Tabanan.

1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Dalam perencanaan pembangunan, sebaran dan kepadatan penduduk merupakan dua hal yang perlu dijadikan acuan. Kondisi saat ini, sebaran dan tingkat kepadatan antar wilayah di Kabupaten Tabanan masih belum merata. Masalah ini tidak hanya dihadapi di Tabanan saja, namun hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Penduduk cenderung lebih memilih tinggal di wilayah perkotaan dibanding wilayah perdesaan. Perbedaan pendapatan di wilayah perkotaan dan perdesaan pada umumnya, merupakan faktor dominan yang menyebabkan penduduk melakukan mobilitas ke perkotaan.

Kepadatan penduduk merupakan ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk adalah faktor fisiografis, ekonomi dan sosial budaya. Kepadatan penduduk yang tinggi di perkotaan rawan menimbulkan konflik sosial karena keterbatasan sumber daya untuk fasilitas sandang, pangan, energi, air bersih, dan sebagainya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan mobilitas penduduk ke perkotaan adalah dengan pemerataan pembangunan yang menjangkau wilayah perdesaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan, sarana dan prasarana umum yang merata akan mendorong distribusi penduduk ke berbagai wilayah.

Persebaran penduduk yang tidak merata dapat mengindikasikan bahwa terjadi ketidakmerataan pembangunan di wilayah tersebut. Wilayah yang padat penduduk cenderung memiliki daya dukung yang lebih baik antara lain daya dukung ekonomi, fasilitas kesehatan dan pendidikan serta akses lainnya. Saat ini penduduk Tabanan masih terkonsentrasi di Kecamatan Tabanan dan Kediri.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio di Kabupaten Tabanan, 2016-2021

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Sex Ratio
2016	438.397	522	98,83
2017	441.269	525	98,77
2018	444.023	529	98,72
2019	446.658	532	98,67
2020	449.172	535	98,61
2021	451.587	538	98,56

Sumber : Proyeksi Penduduk Bali 2015-2025 Hasil Supas

Data hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa dari tahun 2016 - 2021 jumlah penduduk Tabanan terus mengalami peningkatan. Namun, laju pertumbuhannya dari tahun 2016-2020 mengalami perlambatan. Kepadatan penduduk Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 sebesar 538 jiwa per kilometer persegi. Ini menunjukkan bahwa dengan luas wilayah 839,33 kilometer persegi, Kabupaten Tabanan mampu menampung 538 jiwa per kilometer persegi. Daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memunculkan permasalahan lingkungan. Pemerintah perlu



Kependudukan

memperhatikan daya dukung lingkungan terhadap penambahan populasi penduduk. Permasalahan yang muncul pada daerah padat penduduk sangatlah kompleks, sehingga peran pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko yang muncul sangat diharapkan.

Dari hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan memiliki lebih banyak penduduk perempuan. Hal ini dilihat dari *sex ratio* Kabupaten Tabanan sebesar 98,56 persen pada tahun 2021. Angka tersebut berarti dari 100 penduduk perempuan, terdapat 99 penduduk laki-laki. Angka *sex ratio* paling besar berada pada tahun 2018 yaitu sebesar 98,72. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 kondisi sama dengan tahun 2021 yaitu 100 penduduk perempuan, terdapat 99 penduduk laki-laki.

1.3 Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu karakteristik demografi. Angka ini mempunyai pengaruh penting terhadap tingkah laku demografi maupun sosial ekonomi. Untuk menghitung *dependency ratio*, perlu diklasifikasikan terlebih dahulu jumlah penduduk menurut struktur umur. Adapun struktur umur dikelompokkan menjadi tiga, yaitu umur 0-14 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun ke atas. Kelompok umur 15-64 tahun dikenal sebagai kelompok usia produktif. Dikatakan demikian karena penduduk pada kelompok umur ini dianggap mampu melakukan kegiatan ekonomi. Untuk kelompok umur 0-14 tahun dan umur 65 tahun ke atas dikategorikan sebagai kelompok umur yang tidak produktif karena belum mampu atau sudah tidak mampu lagi melakukan kegiatan ekonomi.

Dependency ratio menunjukkan berapa beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 1.3 Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) di Kabupaten Tabanan 2021

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Rasio Usia Muda	18,19	17,01	17,60
Rasio Usia Tua	11,18	13,59	12,39
<i>Dependency Ratio</i>	41,58	44,09	42,83

Sumber : Proyeksi Penduduk Bali 2015-2025 Hasil Supas

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa angka *dependency ratio* di Kabupaten Tabanan pada 2021 sebesar 42,83 persen. Artinya, setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dari penduduk yang menjadi beban tanggungan, sebagian besar merupakan anak-anak usia balita dan sekolah (kelompok umur 0-14 tahun) sebesar 17,60 persen. Sementara sisanya 12,39 persen adalah beban tanggungan usia tua



Kependudukan

(kelompok umur 65 tahun keatas). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Tabanan masih berada pada periode *window of opportunity* untuk menikmati bonus demografi. Bonus demografi pada dasarnya menghubungkan dinamika pertumbuhan penduduk dengan ekonomi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana suatu daerah memiliki tingkat *dependency ratio* terendah. Jika peluang tersebut dimanfaatkan secara optimal, maka Tabanan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

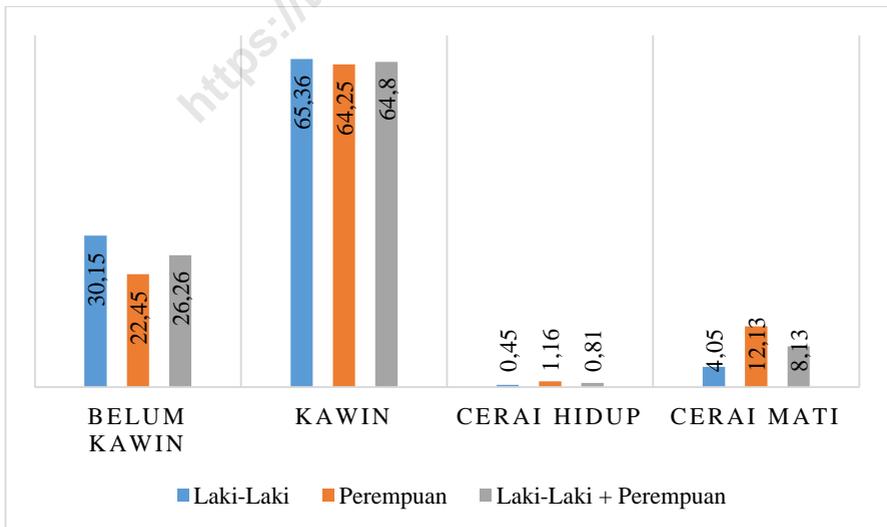
Bila dirinci menurut jenis kelamin, beban tanggungan penduduk perempuan lebih besar dibanding penduduk laki-laki. Sebesar 44,09 persen penduduk perempuan tidak produktif atau menjadi beban tanggungan. Sementara penduduk laki-laki sebesar 41,58 persen. Demikian juga bila dilihat dari kelompok umur, penduduk perempuan pada kelompok umur 65 tahun ke atas (usia tua), lebih banyak menjadi beban tanggungan daripada laki-laki. Sedangkan pada usia anak-anak (umur 0 - 14 tahun), penduduk laki-laki lebih banyak menjadi beban dibanding perempuan (Lihat Tabel 1.4).

1.4 Status Perkawinan

Karakteristik lain dalam kependudukan yang juga perlu diamati adalah status perkawinan. Secara demografi status perkawinan merupakan faktor penting dalam perilaku fertilitas, khususnya status perkawinan penduduk perempuan. Status perkawinan juga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan secara immaterial. Semakin tinggi persentase penduduk berstatus cerai hidup menunjukkan bahwa kualitas rumah tangga dalam masyarakat rendah.

Grafik 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dari seluruh penduduk usia 10 tahun ke atas, sebanyak 26,26 persen berstatus belum kawin; 64,80 persen berstatus kawin; 0,81 persen cerai hidup; dan 8,13 persen cerai mati. Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan yang berstatus belum kawin yaitu 30,15 persen berbanding 22,45 persen. Hal ini dapat dimaklumi karena seorang laki-laki harus benar-benar siap secara mental untuk bertanggung jawab menafkahi rumah tangga sebelum memutuskan untuk berumah tangga. Sementara penduduk yang berstatus cerai mati maupun cerai hidup persentase perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Grafik 1.3 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kabupaten Tabanan 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

1.5 Umur Perkawinan Pertama

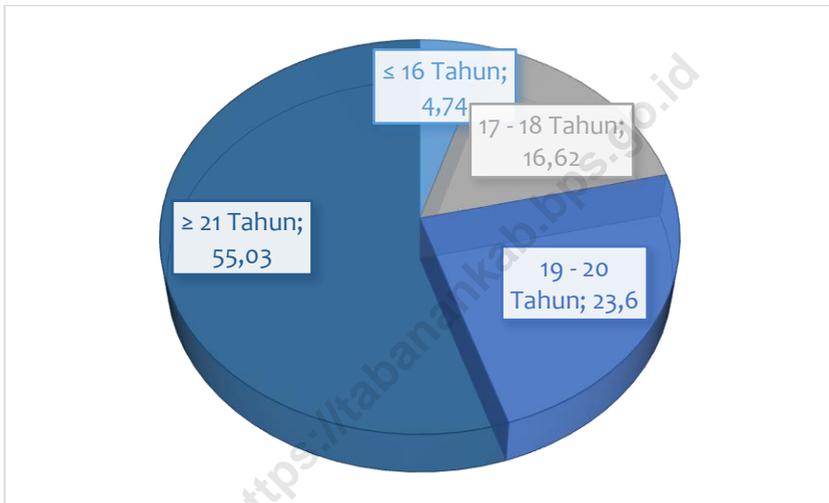
Fertilitas sebagai salah satu ukuran yang sangat penting dalam demografi dimana akan mempengaruhi perubahan penduduk dari sisi jumlah. Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat fertilitas. Makin muda usia perkawinan pertama memberikan peluang untuk memperpanjang masa reproduksi. Hal ini akan menjadikan tingkat kelahiran semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah usia perkawinan pertama akan mempersingkat masa reproduksi wanita. Akibatnya, tingkat kelahiran akan relatif rendah. Kondisi ekonomi, sosial dan budaya ikut menentukan tinggi rendahnya umur perkawinan pertama. Baik umur perkawinan pertama yang terlalu muda maupun terlalu tua dapat berakibat pada tingginya risiko kesehatan ibu dan anak. Usia ibu yang kurang ideal selain memberikan efek pada kesehatan ibu, juga dapat berimbas pada tingkat kesehatan anak yang dilahirkan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, yang sebelumnya 16 tahun. Di sisi lain Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) terus menggalakkan usia perkawinan ideal perempuan pada saat umur 21 tahun. Perkawinan di usia yang terlalu muda mempunyai berbagai macam resiko. Dari segi kesiapan mental, emosi yang masih belum stabil dapat mengakibatkan resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin besar. Resiko lebih besar dihadapi oleh perempuan yang melakukan perkawinan di usia muda karena belum

matangnya organ reproduksi. Sebuah studi menunjukkan, perempuan yang hamil di usia muda memiliki resiko kematian 2 – 4 kali lipat. Oleh karena itu, melalui indikator usia kawin pertama, pemerintah dapat memutuskan seberapa penting melakukan edukasi kepada masyarakat di wilayahnya agar perkawinan di usia dini dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, pada tahun 2020 usia perkawinan pertama wanita di Kabupaten Tabanan sebagian besar sudah sesuai anjuran kesehatan yaitu berada pada kisaran umur 19 tahun keatas (Grafik 1.4). Persentase perkawinan pertama wanita tertinggi berada pada usia lebih dari 21 tahun yaitu mencapai 55,03 persen. Pada usia ini wanita sudah dianggap cukup matang memasuki kehidupan berumah tangga. Di sisi lain, masih terdapat 4,74 persen perempuan melangsungkan perkawinan pertama pada usia di bawah 16 tahun. Secara kumulatif masih terdapat 21,36 persen perempuan yang melakukan pertama saat masih berada pada usia kurang dari sama dengan 18 tahun. Sekiranya pembelajaran secara umum terkait kesiapan membangun rumah tangga masih perlu digalakkan. Selain berbahaya bagi wanita dari sisi kesehatan, pernikahan dini juga memerlukan kesiapan laki-lakinya sebagai kepala rumah tangga. Rendahnya tingkat pendidikan dalam mencari pekerjaan dan kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga tentunya bisa menjadi factor rawan konflik dalam keberlangsungan rumah tangga.

Grafik 1.4 Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Tabanan 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Bab II

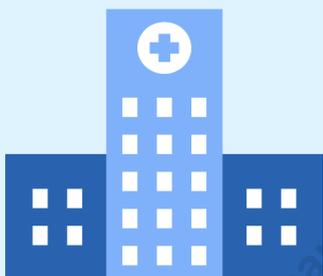
Kesehatan

<https://tabanankab.bps.go.id>

- 2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat
- 2.2 Penolong Persalinan
- 2.3 Ketersediaan dan Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan
- 2.4 Pemanfaatan Jaminan Kesehatan

INFOGRAFIS KESEJAHTERAAN RAKYAT BPS KABUPATEN TABANAN

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tabanan
Tahun 2020



Rumah Sakit 10

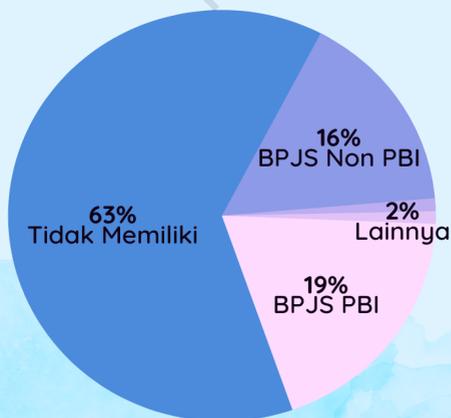
Klinik 14

Puskesmas 20

Puskesmas Pembantu 78

Posyandu 830

KESEHATAN



Sebanyak 63% penduduk di Kabupaten Tabanan tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Sisanya, menggunakan BPJS Non PBI, BPJS PBI, asuransi swasta, maupun dari perusahaan/kantor



Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Tujuannya agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Selain itu, dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 dilaksanakan melalui Program Indonesia Sehat. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang didukung oleh perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN).

Paradigma Sehat dapat didefinisikan sebagai cara pandang, asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang mengutamakan upaya menjaga dan memelihara kesehatan, tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan pilar ini adalah dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, pilar kedua lebih menekankan pada penguatan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan merupakan



Kesehatan

komponen yang harus dipenuhi agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan. Selain meningkatkan akses pelayanan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu juga diperlukan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat serta kendali mutu dan biaya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan harapan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup dan usia harapan hidup manusia dapat meningkat. Sistem kesehatan nasional menggariskan pembangunan bidang kesehatan pada hakekatnya merujuk pada tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Dengan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Berbagai aspek yang menyangkut kesehatan seperti angka kematian bayi, jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, penolong kelahiran, balita yang diimunisasi, persentase balita yang pernah disusui, serta lamanya pemberian ASI akan dibahas pada bab ini.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Masyarakat

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan penduduk adalah Angka Kesakitan (Morbiditas). Indikator ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum, dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat

menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Angka kesakitan (morbiditas) merupakan persentase dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan membuat terganggunya aktivitas terhadap jumlah penduduk. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Tabel 2.1 Angka Morbiditas Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan 2018 – 2020

	2018	2019	2020
Laki-Laki	13,83	14,65	12,74
Perempuan	15,12	13,09	12,93
Laki-Laki + Perempuan	14,48	13,86	12,84

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

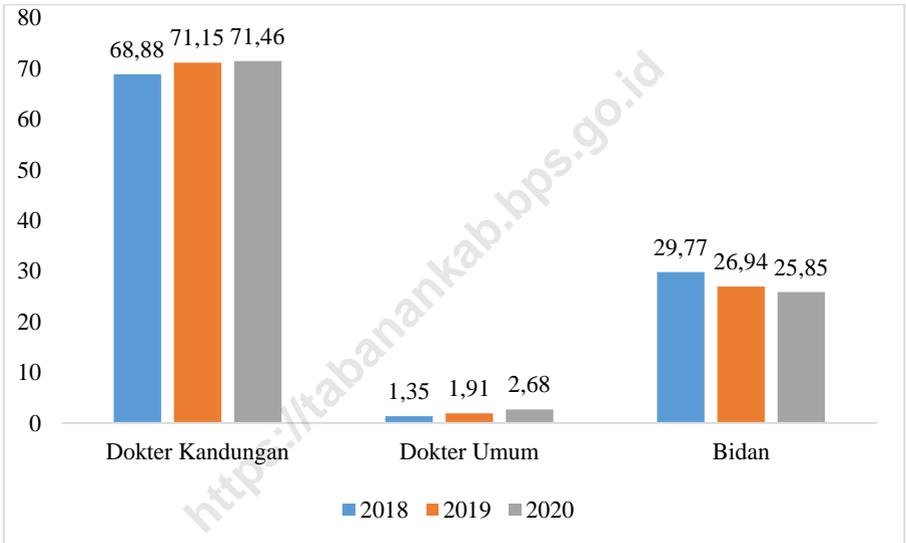
Pada tahun 2020, kondisi kesehatan penduduk di Kabupaten Tabanan lebih baik dibandingkan tahun 2019. Hal ini dilihat dari angka kesakitan yang menurun, dimana pada tahun 2020 sebesar 12,84 persen sedangkan pada tahun 2019 sebesar 13,86 persen. Begitupula pada tahun 2019, kondisi kesehatan penduduk di Kabupaten Tabanan lebih baik dibandingkan tahun 2018. Hal ini dilihat dari angka kesakitan yang menurun, dimana pada tahun 2019 sebesar 13,86 persen sedangkan pada tahun 2018 sebesar 14,48 persen.

Dilihat dari jenis kelamin penduduk, penduduk perempuan maupun laki-laki yang memiliki keluhan kesehatan mengalami penurunan pada tahun 2020. Bila dibandingkan, penduduk laki-laki lebih banyak keluhan kesehatan jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada tahun 2020, sekitar 12,93 persen penduduk perempuan yang memiliki keluhan kesehatan sedangkan 12,74 persen penduduk laki-laki memiliki keluhan kesehatan. Keadaan ini sedikit menurun dibanding tahun 2019, dimana pada tahun tersebut 13,09 persen penduduk perempuan mengalami keluhan kesehatan berbanding 14,65 persen penduduk laki-laki.

2.2 Penolong Persalinan

Indikator lain yang juga digunakan sebagai tolok ukur dalam melihat kondisi kesehatan masyarakat diantaranya adalah kondisi persalinan. Penolong kelahiran merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi yang baru lahir. Selain itu, indikator tersebut dapat menunjukkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik dibandingkan dengan proses kelahiran yang ditolong dukun atau lainnya. Dengan kata lain persalinan yang ditolong oleh tenaga medis menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan.

Grafik 2.1 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Proses Persalinan di Kabupaten Tabanan 2018-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

Selama dua tahun terakhir, proses kelahiran terakhir yang dialami penduduk perempuan di Tabanan ditolong oleh tenaga medis. Tenaga non medis seperti dukun bayi dan non medis lainnya sudah bukan menjadi pilihan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Tabanan sangat tinggi dalam memandang arti pentingnya kesehatan ibu dan anak paska melahirkan.

Tenaga medis dokter kandungan menjadi pilihan utama masyarakat Tabanan untuk membantu proses persalinan. Pada tahun 2020, sebanyak

71,46 persen proses persalinan ditolong oleh dokter kandungan. Angka ini sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 sebesar 71,15 persen dan pada tahun 2018 sebesar 68,88 persen.

Disamping dokter kandungan, masyarakat Tabanan juga mengandalkan bidan sebagai penolong proses kelahiran. Sebesar 25,85 persen pada tahun 2020; 26,94 persen pada tahun 2019; dan 29,77 persen pada tahun 2018 proses kelahiran dibantu oleh bidan. Menurun dari tahun ke tahun penolong proses kelahiran oleh bidan. Sementara sisanya dibantu oleh dokter umum.

2.3 Ketersediaan dan Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui program-program pembangunan terus berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduknya melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Selain itu pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan ini sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan. Beberapa program dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk adalah dengan membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan sejenisnya maupun melalui penyuluhan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran berperilaku hidup sehat, sehingga derajat kesehatan masyarakat.mampu ditingkatkan.

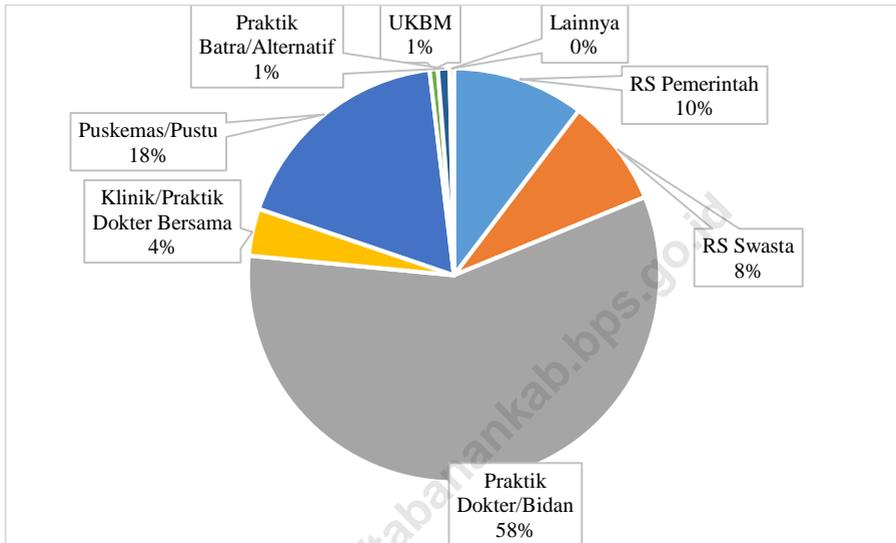
**Tabel 2.2 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tabanan
2018 – 2020**

Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020
Rumah Sakit	9	9	10
Klinik	10	12	14
Puskesmas	20	20	20
Puskesmas Pembantu	82	78	78
Posyandu	830	860	830

Sumber : Pendataan Potensi Desa Kabupaten Tabanan, 2018-2020

Sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tabanan telah membangun sebanyak 20 puskesmas dengan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berobat. Puskesmas maupun puskesmas pembantu ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Sedangkan jumlah sarana rumah sakit yang ada di Kabupaten Tabanan sebanyak 10 buah, yang terdiri dari 1 rumah sakit umum daerah, dan 9 rumah sakit umum swasta. Sarana lain yang tidak kalah penting adalah diaktifkannya Posyandu di 830 lingkungan banjar dan klinik/balai kesehatan di setiap kecamatan di Tabanan.

Grafik 2.2 Persentase Penduduk Menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Tabanan 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri maupun berobat jalan. Pada tahun 2020, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 75,36 persen berobat jalan. Dari penduduk yang berobat jalan tersebut, sebagian besar berobat ke praktek dokter atau bidan, yaitu sebesar 59,89 persen. Kemudian sarana kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu menjadi pilihan kedua yang cukup banyak dikunjungi, yaitu sebesar 18,59 persen. Selanjutnya, rumah sakit pemerintah juga dikunjungi cukup banyak penduduk untuk berobat jalan, yaitu sebesar 10,76 persen. Besarnya persentase penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan medis menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan mutu

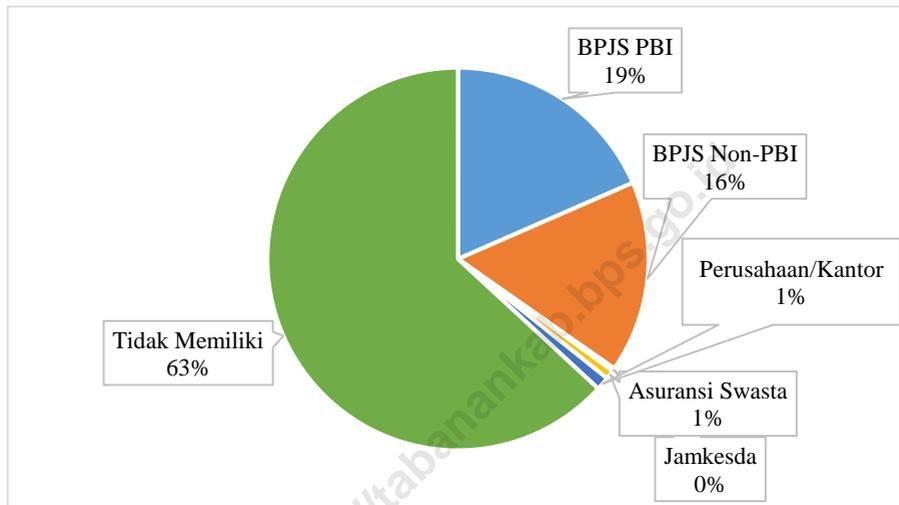
pelayanan medis. Selain itu, banyaknya penduduk yang berobat jalan ke fasilitas medis juga disebabkan karena adanya jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Tabanan baik berupa BPJS, Asuransi Swasta, Jamkesda, dan sebagainya. Pemilihan jenis fasilitas kesehatan yang sering digunakan oleh penduduk juga sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses ke fasilitas kesehatan, kondisi sosial ekonomi penduduk dan ketersediaan fasilitas kesehatan.

2.4 Pemanfaatan Jaminan Kesehatan

Dalam UU No. 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Untuk mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri (*out of pocket*), dalam jumlah yang sulit diprediksi dan kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat besar, diperlukan suatu jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan

Berbagai macam asuransi kesehatan sudah tersedia. Adanya asuransi memungkinkan pembiayaan kesehatan dapat ditanggung bersama secara gotong-royong oleh keseluruhan peserta, sehingga tidak memberatkan orang per orang. Saat ini, asuransi kesehatan dapat dibedakan menjadi asuransi kesehatan swasta, asuransi kesehatan yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Grafik 2.3 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tabanan 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Di Kabupaten Tabanan, pada tahun 2020 sebagian besar penduduknya tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Sementara itu, sebesar 16,22 persen penduduk yang berobat jalan menggunakan BPJS Kesehatan Non PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan 18,48 persen menggunakan BPJS PBI. Berobat jalan menggunakan asuransi swasta sebesar 0,77 persen dan *reimburse* dari kantor/perusahaan tempat bekerja sebesar 1,13 persen. Persentase terkecil yaitu menggunakan jaminan kesehatan jamkesda sekitar 0,24 persen.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pemanfaatan asuransi kesehatan untuk berobat jaan masih belum optimal. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah maupun pihak pengelola asuransi kesehatan terutama BPJS. Rendahnya minat penduduk untuk memanfaatkan asuransi kesehatan bisa jadi karena proses klaim yang berbelit-belit. Diharapkan ke depan, penduduk Tabanan dapat memanfaatkan asuransi kesehatan secara maksimal.

<https://tabanankab.bps.go.id>



Kesehatan

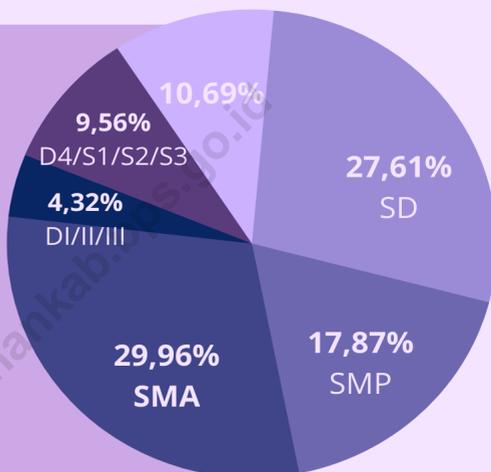
<https://tabanankab.bps.go.id>

<https://tabanankab.bps.go.id>

- 3.1 Tingkat Partisipasi Sekolah
- 3.2 Pendidikan yang Ditamatkan
- 3.3 Angka Melek Huruf
- 3.4 Fasilitas Pendidikan

INFOGRAFIS KESEJAHTERAAN RAKYAT BPS KABUPATEN TABANAN

Persentase Penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Tabanan didominasi lulusan SMA sederajat sebesar 29,96%. Serta sebanyak 10,69% yang belum memiliki ijazah.



PENDIDIKAN



Pada tahun 2020, persentase penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Tabanan yang dapat membaca dan menulis sebanyak **93,19%**

Pendidikan menjadi syarat utama dalam pembangunan manusia, karena pendidikan berperan penting dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Pentingnya pendidikan tercermin dalam pembukaan UUD 1945 dimana tujuan pemerintah Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan di sektor pendidikan selalu mempunyai porsi penting dalam program-program pembangunan. Bahkan anggaran yang digelontorkan untuk sektor pendidikan tidak sedikit yaitu mencapai 20 persen dari APBN.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tersirat menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, terampil, dan berwawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah, maka akan semakin baik kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut.

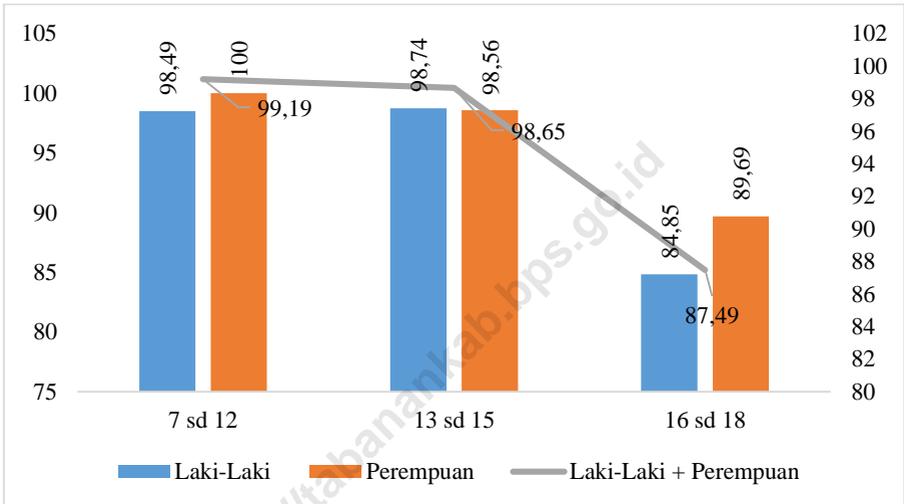
Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi penduduk dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. Diharapkan dengan peningkatan partisipasi sekolah, dapat meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, maka akan semakin besar pula kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

3.1 Tingkat Partisipasi Sekolah

Dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pemerintah selalu berupaya meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang tersebar di berbagai pelosok daerah. Upaya-upaya tersebut misalnya penambahan jumlah sekolah terutama jenjang Sekolah Dasar dan program wajib belajar 6 tahun, yang kemudian dilanjutkan dengan program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun. Pembangunan bidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan, sehingga banyak penduduk yang dapat bersekolah. Untuk melihat keberhasilan upaya pemerintah di bidang pendidikan, salah satunya dapat diukur dari Angka Partisipasi Sekolah (APS).

APS menghitung proporsi dari penduduk kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Meningkatnya APS pada usia sekolah menunjukkan keberhasilan bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Grafik 3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tabanan 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Pada tahun 2020 APS penduduk usia 7-12 tahun sebesar 99,19 persen. Artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun, hampir seluruhnya berstatus masih sekolah dan hanya 0,81 persen yang berstatus tidak bersekolah. APS kelompok usia 7-12 tahun dilihat menurut jenis kelamin, laki-laki belum mencapai 100 persen sedangkan perempuan sudah mencapai 100 persen. Artinya pada kelompok usia 7-12 tahun penduduk jenis kelamin perempuan semuanya berstatus bersekolah. Sementara itu, APS kelompok usia 13-15 tahun lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok usia 7-12 tahun, yaitu sebesar 98,65 persen. Artinya, penduduk usia 13-15 tahun 1,35 persen yang berstatus tidak bersekolah. Selanjutnya pada kelompok usia 16-18 tahun memiliki APS sebesar 87,49 persen. Dilihat



Pendidikan

menurut jenis kelamin, APS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini perlu mendapat perhatian karena pada usia ini banyak laki-laki yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya.

3.2 Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk umur 15 tahun ke atas. Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Tabel 3.1 menyajikan besarnya persentase penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk yang berpendidikan SMP ke atas sebesar 61,71 persen. Artinya sudah lebih dari setengah penduduk di Kabupaten Tabanan telah menempuh wajib belajar 9 tahun sedangkan 38,29 persen sisanya masih berpendidikan di bawah SMP dan tidak mempunyai ijazah. Tingginya jumlah penduduk yang berpendidikan SMP ke atas ini menggambarkan bahwa semakin besarnya kesadaran penduduk Kabupaten Tabanan untuk menyelesaikan pendidikan tidak hanya di tingkat dasar tetapi sampai dengan tingkatan yang lebih tinggi yaitu sekolah menengah dan universitas.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Tabanan 2020

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak Mempunyai Ijazah	9,66	11,69	10,69
SD Sederajat	23,06	32,02	27,61
SMP Sederajat	18,54	17,22	17,87
SMA Sederajat	33,66	26,39	29,96
D-I/D-II/D-III	4,43	4,21	4,32
D-IV/S1/S2/S3	10,65	8,48	9,56
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Jika dilihat menurut jenis kelamin, sampai pada jenjang SD persentasenya didominasi oleh perempuan. Sedangkan mulai pada jenjang SMP ke atas, persentase laki-laki lebih besar. Beberapa faktor ditengarai mempengaruhi keputusan perempuan terkait pendidikan, salah satunya pengaruh adat istiadat. *Stereotype* yang melekat pada diri perempuan adalah ketika sudah dewasa nanti hanya akan mengurus rumah tangga sehingga tidak memerlukan pendidikan yang tinggi.

3.3 Angka Melek Huruf

Gambaran umum tingkat kecerdasan penduduk suatu daerah dapat ditunjukkan oleh kemampuan baca tulis atau biasa disebut dengan Angka Melek Huruf (AMH). Kemampuan membaca dan menulis merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan oleh setiap penduduk untuk menuju

Pendidikan

hidup sejahtera. Dengan kemampuan tersebut seseorang akan lebih mudah dalam mengakses informasi. Selain itu dengan kemampuan tersebut seseorang dapat lebih mudah mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan serta memahami program-program pembangunan. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan melalui besarnya persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur melalui aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi mutu sumber daya manusia suatu masyarakat. Laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk meningkatkan kualitas diri dan kecerdasan.

Tabel 3.2 Angka Melek Huruf Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan 2018 - 2020

	2018	2019	2020
Laki-Laki	97,28	97,84	96,49
Perempuan	89,49	92,12	89,99
Laki-Laki + Perempuan	93,32	94,93	93,19

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

Berdasarkan hasil Susenas 2020, banyaknya penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Tabanan yang dapat membaca dan menulis tercatat sebanyak 93,19 persen menurun 1,74 persen dibanding tahun sebelumnya. Sisanya sebanyak 6,81 persen adalah mereka yang buta huruf. Angka melek huruf pada penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk

perempuan dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, AMH mengalami penurunan, penurunan terjadi pada penduduk berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Penurunan angka melek huruf ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan menurun dan kesadaran masyarakat akan pendidikan menurun. Meskipun generasi muda sudah seluruhnya melek huruf, namun perlu dipikirkan juga untuk generasi tua dimana masih banyak yang buta huruf terutama untuk kaum perempuan. Perlu dikaji apakah pelatihan baca dan tulis dibutuhkan agar peningkatan kualitas hidup tidak hanya dirasakan kalangan tertentu saja tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tabanan.

3.4 Fasilitas Pendidikan

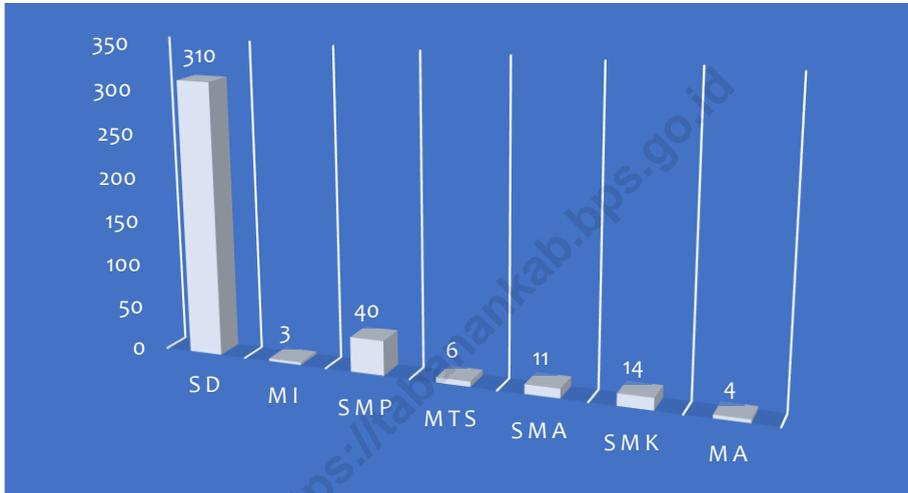
Pembangunan fasilitas pendidikan yang bersifat menyeluruh dan terpadu diperlukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan dalam bidang pendidikan. Di samping itu, peningkatan kualitas pendidikan juga diperlukan untuk menghasilkan anak didik yang semakin bermutu. Untuk mewujudkan kedua hal tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sangatlah penting. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Tabanan pada tahun ajaran 2020, sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Tabanan, untuk SD/MI ada 313 sekolah, SMP/MTs ada 46 sekolah, dan SMA/SMK/MA ada 29 sekolah.

Dengan melihat keadaan tersebut mencerminkan bahwa untuk tingkat pendidikan SMA, siswa belum dapat leluasa dalam menentukan pilihan sekolah yang diinginkan terutama pilihan untuk sekolah di wilayah sendiri. Begitu pula untuk melanjutkan pada pendidikan tinggi seperti universitas,

Pendidikan

masih sedikit pilihan yang dapat dilakukan siswa dalam menentukan perguruan tinggi yang akan dipilih, sehingga banyak siswa memilih melanjutkan sekolah/kuliah di luar Kabupaten Tabanan.

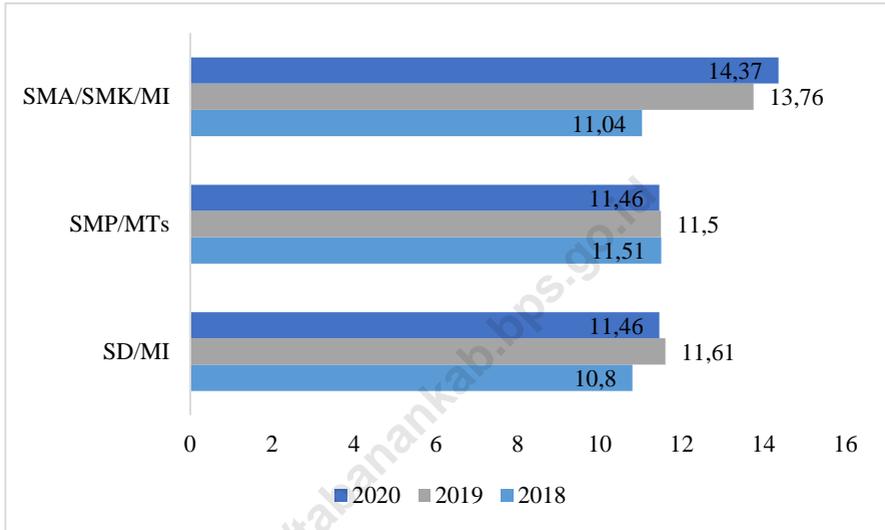
Grafik 3.2 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tabanan 2020



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, 2020

Rasio murid terhadap guru merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingkat mutu pengajaran di kelas. Rasio ini menggambarkan beban tugas guru dalam mengajar pada suatu jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai rasio murid terhadap guru berarti semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran cenderung menurun.

**Grafik 3.4 Rasio Murid terhadap Guru di Kabupaten Tabanan
2018-2020**



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, 2018-2020

Pada tahun ajaran 2018-2020 rasio murid-guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Tabanan berada di angka 11 hingga 15, artinya satu guru bertanggung jawab terhadap 11 hingga 15 anak didik. Rasio paling tinggi terjadi pada jenjang Pendidikan SMA, dimana dalam kurun waktu tiga tahun terakhir rasionya sebesar 14,37 pada tahun 2020; 13,76 pada tahun 2019; dan 11,04 pada 2018. Hal ini menandakan bahwa peningkatan jumlah guru SMA tidak sebanding dengan peningkatan siswa SMA. Pada tahun 2020, terjadi penurunan rasio terjadi pada jenjang SMP dan SD. Pada jenjang SMP, rasio murid terhadap guru tahun 2018 sebesar 11,51 menjadi 11,50 pada 2019 kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 11,46. Pada jenjang SD, rasio murid terhadap guru tahun 2018 sebesar 10,80



Pendidikan

menjadi 11,61 pada 2019 kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 11,46 Peningkatan rasio pada jenjang SMA paling besar dibandingkan jenjang lainnya. Indikasi ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat terkait ketersediaan jumlah guru SD, SMP dan SMA agar mutu pengajaran di kelas dapat lebih ditingkatkan.

<https://tabanankab.bps.go.id>

<https://tabanankab.bps.go.id>

- 4.1 Karakteristik Penduduk Usia Kerja
- 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
- 4.3 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
- 4.4 Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

INFOGRAFIS KESEJAHTERAAN RAKYAT BPS KABUPATEN TABANAN

Karakteristik Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Tabanan Tahun 2021



ANGKATAN KERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tabanan sebesar **74,98%**, yang berarti terdapat 75 orang yang bekerja dari 100 orang usia kerja.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar **3,94%**, yang berarti terdapat 4 orang yang menganggur dari 100 orang angkatan kerja.

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang sangat berharga ketika penduduk usia kerjanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Batasan usia tenaga kerja yang selama ini digunakan adalah 15 tahun ke atas, mengingat pada usia tersebut seseorang telah dianggap cukup matang secara fisik dan mental sehingga mampu melakukan kegiatan ekonomi. Menurut Sumitro (1987), definisi tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, karena melalui tenaga kerja faktor-faktor produksi lain dapat digerakkan untuk menghasilkan suatu barang. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Besaran angkatan kerja mencerminkan jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Kelebihan pasokan tenaga kerja dalam jumlah besar akan menyebabkan masalah ketenagakerjaan yang serius, diantaranya adalah pengangguran, meledaknya lapangan usaha informal dan setengah pengangguran (Sigit, 2000). Untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka seyogyanya perekonomian yang dibangun menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap seluruh angkatan kerja baru.



Angkatan Kerja

Partisipasi aktif angkatan kerja berguna untuk menggerakkan roda perekonomian sehingga berdampak positif bagi keberlangsungan pembangunan di berbagai bidang. Disamping itu, ketenagakerjaan juga memiliki peran penting dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran secara bertahap sehingga meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Tabanan, maka pada bab ini akan disajikan ulasan mengenai karakteristik penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), lapangan usaha, status pekerjaan, jenis pekerjaan dan jam kerja.

4.1 Karakteristik Penduduk Usia Kerja

Sesuai dengan yang sudah dibahas sebelumnya, penduduk usia kerja dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Untuk angkatan kerja terdiri dari dua kategori, yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur. Sementara bukan angkatan kerja terdiri dari tiga kategori, yaitu penduduk yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Analisa terhadap karakteristik penduduk usia kerja dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat aktivitas, tingkat kesempatan kerja, dan tingkat pengangguran di suatu wilayah.

Secara umum, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 mencapai 370.528 orang. Dari jumlah ini, 74,98 persen termasuk dalam kategori angkatan kerja dan sisanya termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk usia kerja meningkat 0,91 persen, dimana pada tahun 2010 tercatat sebanyak 367.178 orang. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir,

persentase angkatan kerja mengalami penurunan dari 75,47 persen menjadi 74,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan penduduk yang berpotensi untuk bekerja semakin berkurang.

Berbeda dengan angkatan kerja yang menurun, persentase penduduk yang bekerja atau melakukan aktivitas ekonomi mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 penduduk yang bekerja tercatat 95,79 persen dan meningkat menjadi 96,06 persen pada 2021. Sejalan dengan hal tersebut, persentase pengangguran mengalami penurunan dari 4,21 persen menjadi 3,94 persen. Peningkatan yang signifikan pada jumlah pengangguran tahun 2020 akibat adanya pandemi covid 19, banyak pekerja yang terkena PHK dari perusahaan akibat terdampak pandemi

Tabel 4.1 Karakteristik Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Tabanan 2019 - 2021

Uraian	2019		2020		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Penduduk Usia Kerja	359.416	100	367.178	100	370.528	100
Angkatan Kerja	271.580	75,56	277.098	75,47	277.828	74,98
Bekerja	268.094	98,72	65.435	95,79	266.889	96,06
Pengangguran	3.486	1,28	11.663	4,21	10.939	3,94
Bukan Angkatan Kerja	87.836	24,44	90.080	24,53	92.700	25,02

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2019-2021

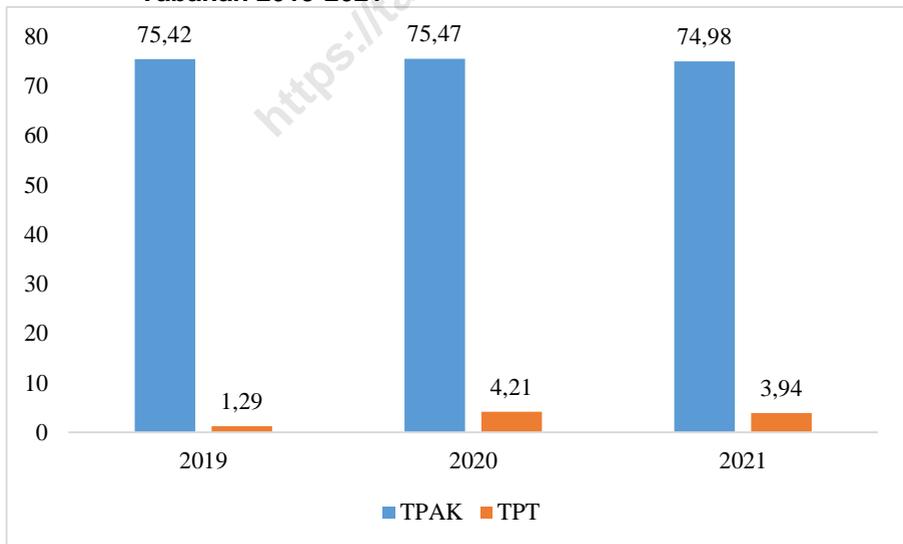
Dengan menurunnya angkatan kerja, mengakibatkan persentase penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja menjadi meningkat. Golongan ini meliputi penduduk yang masih bersekolah, sedang mengurus rumah tangga, dan aktivitas lainnya.

Angkatan Kerja

4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan aktivitas ketenagakerjaan dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk yang secara aktif dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi pasokan tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) atau yang biasa disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selain itu, besarnya partisipasi penduduk dibidang ketenagakerjaan dapat dilihat melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja.

Grafik 4.1 TPAK dan TPT menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan 2019-2021



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2019-2021

Dari tahun 2019 sampai dengan 2021, tercatat TPAK dan TPT nilainya fluktuatif. Pada tahun 2020 dimana merupakan tahun awal pandemi covid 19 nilai TPAK mengalami peningkatan begitupula TPT meningkat sangat signifikan. Sedangkan pada tahun 2021, nilai TPAK mengalami penurunan maupun TPT mengalami penurunan. Tercatat nilai TPAK sebesar 74,98, hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang usia kerja 75 orang diantaranya terlibat dalam aktivitas ekonomi atau bekerja. Kondisi yang sama juga terjadi pada TPT, tercatat TPT pada tahun 2019 sebesar 1,29 persen, pada tahun 2020 sebesar 4,21 persen dan pada tahun 2021 sebesar 3,94 persen.

4.3 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Salah satu ukuran untuk melihat potensi lapangan usaha perekonomian dalam menyerap tenaga kerja adalah komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan. Selain itu, indikator tersebut juga mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Untuk mengetahui lapangan usaha-lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja perlu dilakukan analisis mengenai lapangan pekerjaan.

Lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Tabanan adalah di lapangan usaha pertanian. Pada tahun 2019, pertanian masih merupakan yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja. Sebanyak 26,70 persen penduduk menggantungkan hidupnya pada lapangan usaha pertanian dalam arti luas. Hal ini juga sejalan dengan kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana nilai tambah dari pertanian Kabupaten Tabanan pada tahun 2019 sebagian besar berasal dari pertanian.

Angkatan Kerja

Tabel 4.2 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali, 2021

Lapangan Kerja Utama	Tabanan		Bali	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian	80.797	30,27	534.705	21,90
Manufaktur	66.951	25,09	567.634	23,34
Jasa-Jasa	119.141	44,64	1.339.515	54,86
Total	266.889	100,00	2.441.854	100,00

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2021

Kabupaten Tabanan merupakan daerah agraris, dimana 30,27 persen mata pencaharian penduduknya bergantung dari di lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha jasa. Persentase penduduk yang bekerja Kabupaten Tabanan di lapangan usaha pertanian sebesar 30,27 persen, lapangan usaha manufaktur 25,09 persen dan lapangan usaha jasa-jasa 44,64 persen. Sedangkan di Provinsi Bali, persentase penduduk yang bekerja pada lapangan usaha pertanian sebesar 21,90 persen, lapangan usaha manufaktur sebesar 23,34 persen dan lapangan usaha jasa-jasa 54,86 persen. Di Provinsi Bali maupun Kabupaten Tabanan mayoritas penduduk bekerja pada sektor jasa. Secara terperinci disajikan pada Tabel 4.2.

4.4 Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaannya. Status pekerjaan menurut BPS terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

Angkatan Kerja

- Berusaha sendiri, dimana seseorang bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar. Menanggung risiko secara ekonomis ditandai dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut.
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, yaitu bekerja atau berusaha atas risiko sendiri dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan/atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap.
- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, adalah seseorang berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/ karyawan/ pegawai tetap yang dibayar.
- Buruh/karyawan/pegawai merupakan seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
- Pekerja bebas, yaitu seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap, yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga, atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- Pekerja keluarga atau tidak dibayar, adalah anggota rumah tangga yang bekerja membantu kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lain atau orang lain yang berusaha, dengan tidak mendapat upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

Angkatan Kerja

Tabel 4.3 Jumlah dan Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Tabanan 2021

Status Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Berusaha sendiri	35.404	13,27
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar	65.214	24,43
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	5.336	1,99
Buruh/karyawan/pegawai	87.300	32,71
Pekerja bebas di pertanian	5.758	2,16
Pekerja bebas di non pertanian	11.472	4,30
Pekerja keluarga/tidak dibayar	56.405	21,14
Jumlah	266.889	100,00

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2021

Tenaga kerja di Tabanan tahun 2021 didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 32,71 persen. Sementara itu, sebanyak 39,69 persen dari total tenaga kerja merupakan pengusaha, dimana yang berusaha sendiri sebesar 13,27 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 24,43 persen, dan 1,99 persen berusaha dibantu buruh tetap/dibayar. Penduduk yang berkecimpung sebagai pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun non pertanian masih ditemukan di Tabanan, walaupun persentasenya kecil.

Sementara itu, yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah Tabanan adalah persentase pekerja keluarga/tidak dibayar yang masih cukup besar, yaitu mencapai 21,14 persen. Pada umumnya, pekerja keluarga



Angkatan Kerja

didominasi oleh kaum perempuan karena kebanyakan dari mereka membantu suami atau keluarganya untuk menjalankan usaha.

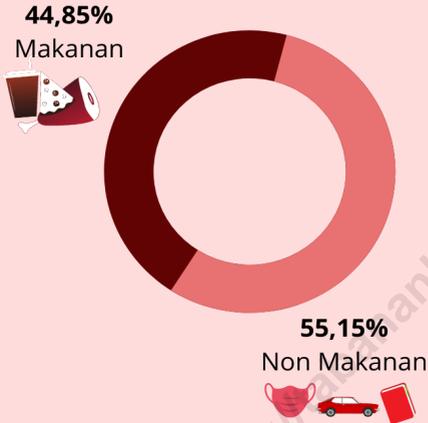
<https://tabanankab.bps.go.id>

Bab V

Pola Konsumsi

<https://tabanankab.bps.go.id>

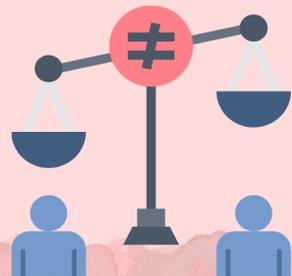
INFOGRAFIS KESEJAHTERAAN RAKYAT BPS KABUPATEN TABANAN



Pada Tahun 2020, Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Tabanan lebih banyak dikeluarkan untuk keperluan non-makanan yakni sebesar 55,15%

POLA KONSUMSI

Ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Tabanan tergolong rendah



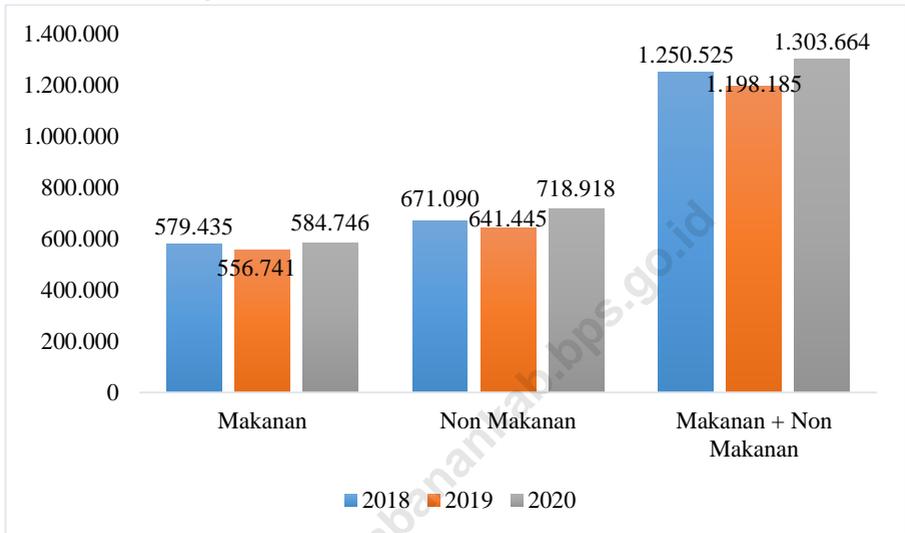
Tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya dari pola konsumsi masyarakat. Melalui pola konsumsi, dapat diketahui proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan yang dilakukan oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Hal ini sesuai dengan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran non-makanan, maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun sebaliknya, semakin kecil proporsi pengeluaran non-makanan, merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang semakin menurun.

Pergeseran pola pengeluaran makanan ke non makanan terjadi karena elastisitas permintaan terhadap komoditi makanan rendah, dan sebaliknya permintaan terhadap komoditi non makanan tinggi. Dalam transformasi konsumsi rumah tangga, pergeseran pola konsumsi ditandai dengan empat hal yaitu pengeluaran untuk bahan makanan dan pakaian turun, belanja barang tahan lama meningkat, pengeluaran untuk jasa meningkat, dan pengeluaran untuk *leisure* meningkat. Jika kecenderungan ini terjadi, menandakan bahwa masyarakat sudah mempunyai standar hidup yang tinggi.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang akan dibahas pada bab ini mencakup seluruh pengeluaran konsumsi akhir atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini termasuk pembelian makanan maupun non makanan (barang dan jasa) dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pola Konsumsi

Grafik 5.1 Perkembangan Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan di Kabupaten Tabanan 2018-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

Di Kabupaten Tabanan, rata-rata konsumsi per kapita sebulan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, pengeluaran tersebut sebesar Rp 1.250.525 yang terdiri dari Rp 579.435 untuk konsumsi makanan dan Rp 671.090 untuk konsumsi non makanan. Pada tahun 2019, terjadi penurunan, dimana rata-rata konsumsi per kapita sebulan menjadi Rp 1.198.185 yang terdiri dari Rp 556.741 untuk konsumsi makanan dan Rp 641.445 untuk konsumsi non makanan. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan konsumsi masyarakat dimana rata-rata konsumsi per kapita sebesar Rp 1.303.664 yang terdiri dari Rp 584.746 untuk konsumsi makanan dan Rp 718.918 non makanan.



Pola Konsumsi

Penurunan rata-rata konsumsi per kapita sebulan terjadi pada tahun 2019. Di tahun tersebut, rata-rata konsumsi per kapita sebulan mencapai Rp 1.198.185 atau menurun 4 persen dibanding tahun sebelumnya. Secara proporsi, pengeluaran non makanan lebih banyak berkontribusi, dimana penurunan konsumsi makanan sebesar Rp 22.694 dan non makanan sebesar Rp 29.645. Walaupun terjadi penurunan pada rata-rata konsumsi per kapita sebulan, namun proporsi konsumsi non makanan lebih banyak dibandingkan dengan makanan. Hal ini merupakan pertanda bagus, karena masyarakat Tabanan sudah mulai mengalokasikan lebih banyak pengeluaran non makanan untuk menuju standar hidup yang lebih baik.

Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita sebulan yang signifikan terjadi pada tahun 2020. Di tahun tersebut, rata-rata konsumsi per kapita sebulan mencapai Rp 1.303.664 atau meningkat 8 persen dibanding tahun sebelumnya. Secara proporsi, pengeluaran non makanan lebih banyak berkontribusi, dimana peningkatan konsumsi makanan sebesar Rp 28.005 dan non makanan sebesar Rp 77.473. Hal ini merupakan pertanda bagus, karena masyarakat Tabanan sudah mulai mengalokasikan lebih banyak pengeluaran non makanan untuk menuju standar hidup yang lebih baik.

Pola Konsumsi

Grafik 5.2 Perkembangan Pola Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Tabanan 2018 – 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

Disamping kondisi rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang membaik, perlu dilihat juga distribusi pengeluaran makanan dan non makanan. Proporsi rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berkisar antara 44 hingga 47 persen dari total pengeluaran. Artinya, proporsi rata-rata konsumsi non makanan masih lebih besar dibandingkan dengan konsumsi makanan.

Apabila dilihat dari perkembangannya, peningkatan proporsi konsumsi makanan terjadi pada tahun 2019, dimana pada tahun sebelumnya sebesar 46,34 persen menjadi 46,67 persen. Peningkatan tersebut tidak terlalu besar, tetapi setidaknya ada indikasi bahwa kesejahteraan penduduk Tabanan membaik. Namun, pada tahun 2020 proporsi konsumsi makanan justru

mengalami penurunan dimana pada tahun sebelumnya 46,67 persen menjadi 44,85 persen. Kondisi ini tentu saja adalah kabar yang menggembirakan karena harapannya proporsi konsumsi makanan tersebut selalu menurun setiap tahun.

Tabel 5.1 Distribusi Pendapatan di Kabupaten Tabanan 2015 – 2020

Tahun	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi
2015	19,37	36,76	43,88
2016	19,73	37,20	43,07
2017	21,00	39,91	39,09
2018	20,72	38,42	40,86
2019	21,30	39,14	39,56
2020	19,54	40,63	39,84

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2014-2019

Selain proporsi konsumsi makanan dan non makanan, diperlukan indikator lain untuk melihat apakah tingkat kesejahteraan tersebut sudah dirasakan penduduk Tabanan secara merata atau masih timpang. Kriteria ketimpangan yang direkomendasikan Bank Dunia dapat dilihat melalui distribusi pendapatan. Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan atau dapat didekati dengan besar pengeluaran, yaitu: 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan dianggap tinggi apabila kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kue ekonomi di bawah 12 persen;



Pola Konsumsi

ketimpangan sedang apabila menikmati kue ekonomi 12 hingga 17 persen; dan ketimpangan rendah apabila menikmati kue ekonomi di atas 17 persen.

Merujuk pada ukuran di atas, ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Tabanan tergolong rendah. Pada tahun 2020, porsi kue ekonomi yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah sekitar 19,54 persen. Sementara, kue ekonomi yang dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan sedang sekitar 40,63 persen dan 20% penduduk berpendapatan tinggi sekitar 39,94 persen.

Dibandingkan dengan tahun 2019, porsi kue ekonomi yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 21,30 persen menjadi 19,54 persen. Sementara, kue ekonomi yang dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan sedang mengalami peningkatan dari 39,14 persen menjadi 40,63 persen. Peningkatan juga terjadi pada 20% penduduk berpendapatan tinggi dari 39,56 persen menjadi 39,84 persen.

Dibandingkan dengan tahun 2018, porsi kue ekonomi yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari 20,72 persen menjadi 21,30 persen. Sementara kue ekonomi yang dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan sedang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 dari 38,42 persen menjadi 39,14 persen. Penurunan juga terjadi pada 20% penduduk berpendapatan tinggi dari 40,86 persen menjadi 39,56 persen.

Dibandingkan dengan tahun 2017, porsi kue ekonomi pada kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 21 persen menjadi 20,72 persen. Penurunan porsi kue



Pola Konsumsi

ekonomi juga terjadi pada kelompok 40% penduduk berpendapatan sedang. Peningkatan terjadi pada kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi, yaitu dari 39,09 persen menjadi 40,86 persen. Peningkatan pada kelompok ini perlu mendapat perhatian karena harapannya persentase tersebut selalu menurun setiap tahun agar kue ekonomi dapat dinikmati lebih merata.

<https://tabanankab.bps.go.id>

Bab VI

Perumahan

<https://tabanankab.bps.go.id>

- 6.1 Kualitas Perumahan
- 6.2 Luas Lantai
- 6.3 Jenis Lantai
- 6.4 Sumber Penerangan
- 6.5 Sumber Air Minum
- 6.6 Fasilitas Buang Air Besar
- 6.7 Teknologi Informasi dan Komunikasi

INFOGRAFIS KESEJAHTERAAN RAKYAT BPS KABUPATEN TABANAN



Jumlah Rumah Tangga Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 sebanyak **147.064**



Leding Meteran/Eceran menjadi sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Tabanan yakni sebanyak **28,76%**

PERUMAHAN

Kualitas Perumahan



98%

Dinding Permanen



100%

Atap yang layak



98,87%

Lantai Bukan Tanah



93,27%

Tangki Septik

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, di samping sandang dan pangan. Tanpa rumah sebagai tempat tinggal, tentunya manusia tidak dapat hidup dengan layak. Rumah juga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, dilihat dari kualitas rumah jenis lantai, dinding, dan jenis atap yang digunakan. Selain itu, fasilitas yang dimiliki seperti instalasi air bersih, sumber air minum, dan tempat buang air besar, juga dapat menunjukkan kualitas kebersihan lingkungan.

Selain sebagai kebutuhan dasar, perumahan juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi. Peningkatan sektor tersebut dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja serta mendorong pembentukan modal yang besar. Harapannya, produktivitas masyarakat dapat meningkat dan mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan.

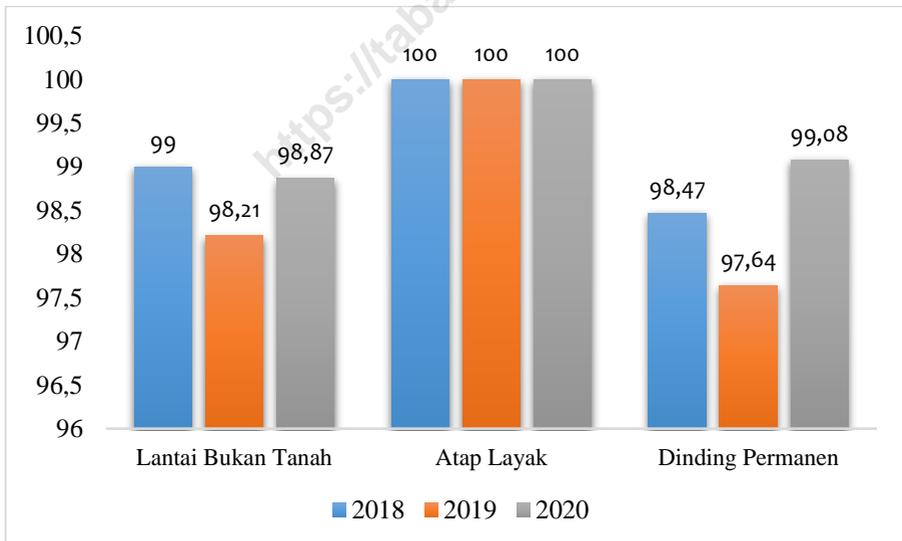
Tersedianya informasi mengenai perumahan, dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat tepat sasaran sehingga mutu lingkungan perumahan dapat meningkat, baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan.

Perumahan

6.1 Kualitas Perumahan

Di Kabupaten Tabanan, kondisi kualitas perumahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sudah tergolong baik. Seluruh rumah tangga di Tabanan memiliki atap yang layak. Untuk dinding permanen, persentasenya sudah di atas 99,08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Tabanan memiliki dinding yang layak. Namun dilihat dari persentasenya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kondisi yang sama juga terjadi pada kriteria lantai bukan tanah. Hal ini diharapkan menjadi *warning* bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas perumahan masyarakat di Tabanan menjadi lebih baik lagi.

Grafik 6.1 Kualitas Perumahan di Kabupaten Tabanan 2018 - 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

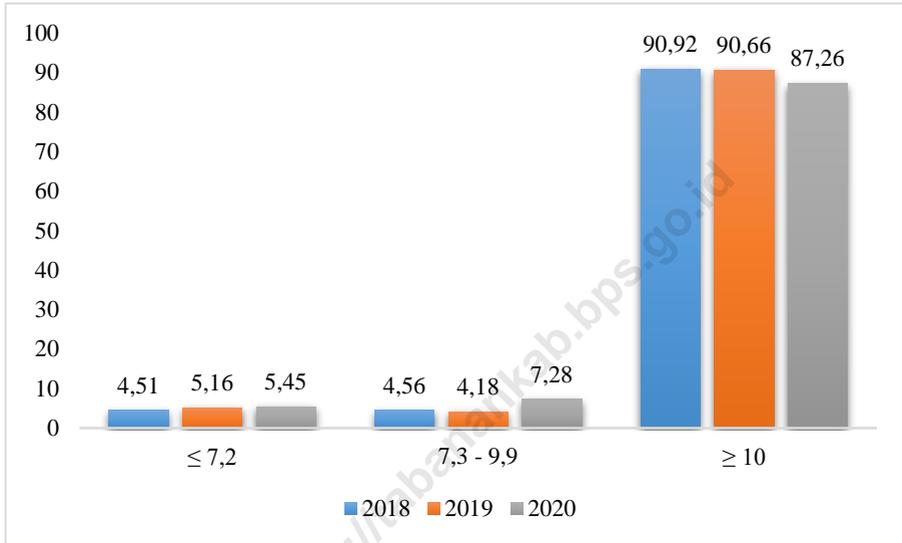
6.2 Luas Lantai

Luas lantai rumah merupakan aspek penting dalam menentukan kualitas perumahan karena berkaitan dengan ruang gerak penghuninya. Menurut Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per kapita minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di rumah. Aktivitas tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian dan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2001).

Luas lantai didefinisikan sebagai luas yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Semakin luas lantai rumah maka cenderung semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga. Sebaliknya, luas lantai yang sempit akan membawa dampak buruk, seperti kurangnya konsumsi oksigen dan mudah menularnya penyakit kepada anggota keluarga lain.

Perumahan

Grafik 6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per Kapita (m²) di Kabupaten Tabanan 2018 - 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita 10 m² ke atas di Kabupaten Tabanan sudah mencapai 87,26 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi luas lantai rumah per kapita kurang baik, dimana pada tahun 2020 persentasenya sebesar 90,66 persen. Hal ini menggambarkan bahwa, sebagian besar penduduk sudah menghuni rumah dengan luas yang memadai dan memenuhi kriteria sehat dari segi luas lantai perkapita.

Rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita 7,3-9,9 m² hanya sebesar 7,28 persen pada tahun 2020 dan 4,18 persen pada tahun 2019. Pada *range* luas lantai ini tidak sepenuhnya dapat

dikategorikan rumah tidak layak. Alasannya karena menurut kajian pemerintah, rumah sehat atau layak memiliki luas lantai perkapita minimal 9 m² dan menurut Kementerian Kesehatan minimal 8 m². Dengan demikian, rumah dengan luas lantai per kapita pada range ini sebagian besarnya masih kategori rumah layak atau rumah sehat.

Kondisi perumahan di Kabupaten Tabanan yang tergolong rumah tidak sehat hanya sebesar 5,45 persen pada tahun 2020 dan 5,16 persen pada tahun 2019. Dikatakan rumah tidak sehat karena hanya memiliki luas lantai perkapita 7,2 m² ke bawah.

6.3 Jenis Lantai

Lantai adalah bagian dasar sebuah ruang dan berfungsi untuk menunjang aktivitas di dalam rumah. Sebagai salah satu bagian dari struktur rumah, lantai merupakan tempat untuk meletakkan perabot. Dari sisi estetika, lantai dapat memperindah ruang dan membentuk karakter ruang. Seiring perkembangan zaman, lantai kini bukan hanya bagian dari struktur rumah, tetapi juga berfungsi sebagai penghias' rumah dengan corak, tekstur, dan warna yang bervariasi.

Ada berbagai jenis lantai rumah, diantaranya adalah ada yang terbuat dari semen atau ubin, keramik, atau cukup tanah biasa. Syarat lantai pada rumah sehat yang penting adalah tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak becek pada musim hujan. Lantai yang basah atau berdebu akan menjadi sarang penyakit dan dapat mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga.

Perumahan

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai di Kabupaten Tabanan 2018 - 2020

Jenis Lantai Terluas	2018	2019	2020
Keramik	76,96	80,57	82,24
Semen/Bata Merah	19,03	14,42	14,37
Ubin/Tegel/Teraso	2,37	2,00	1,80
Tanah	1,00	1,79	0,13
Marmer/Granit	0,44	1,21	1,45
Parket/Vinil/Permadani	0,20	0,00	0,01
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

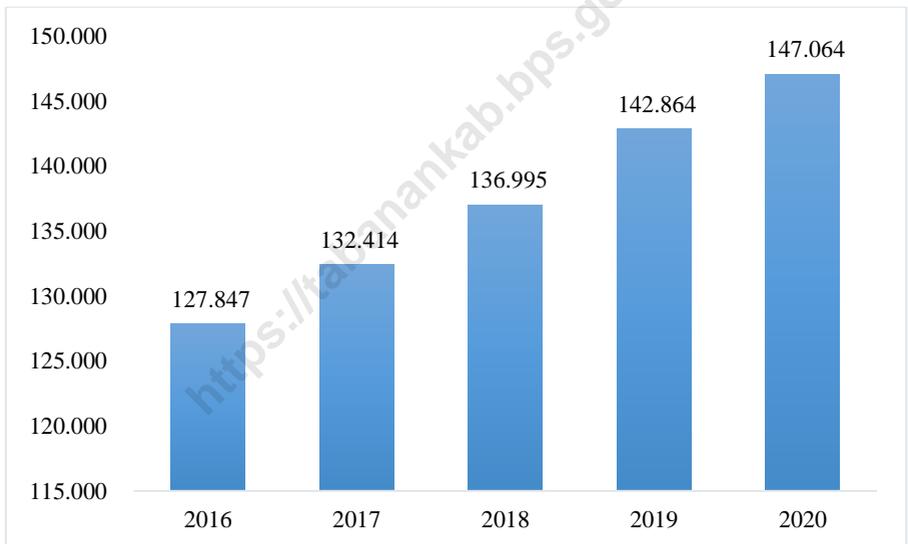
Jenis lantai terluas yang digunakan rumah tangga di Tabanan pada tahun 2020 mayoritas berjenis keramik, yaitu sebesar 82,24 persen. Jenis lantai terluas terbesar kedua adalah lantai dari semen/bata merah. Sedangkan jenis lantai rumah yang lainnya, digunakan oleh rumah tangga kurang dari 5 persen, namun masih ada yang menggunakan jenis lantai rumahnya dari tanah, sebesar 0,13 persen.

6.4 Sumber Penerangan

Fasilitas perumahan lain yang juga penting adalah penerangan. Penerangan selain mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya, dapat pula digunakan sebagai indikator pengukur

keberhasilan program pembangunan pemerintah. Fasilitas penerangan ini dapat bersumber dari listrik atau bukan listrik seperti petromak/aladin, pelita/sentir/obor, dan lainnya. Listrik merupakan sumber penerangan yang mempunyai nilai paling tinggi dibandingkan dengan penerangan petromak, pelita, dan sumber penerangan lainnya. Hal ini disebabkan karena cahaya listrik lebih terang, praktis dan modern, serta tidak menimbulkan polusi.

Grafik 6.3 Jumlah Rumah Tangga Pelanggan Listrik PLN 2016 - 2020



Sumber : PLN Kabupaten Tabanan, 2016-2020

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), merupakan sarana atau alat untuk merekam program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dari hasil perekaman tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan listrik sebagai sumber penerangan rumah tangga di Tabanan sudah mencapai 100 persen. Fakta ini di perkuat oleh semakin meningkatnya



Perumahan

pelanggan PLN sejak tahun 2016 hingga 2020. Aliran listrik PLN telah menjangkau seluruh desa yang ada di Tabanan.

6.5 Sumber Air Minum

Air minum bersih merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air minum bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Untuk menyediakan air bersih dalam jumlah yang cukup perlu diperhatikan asal sumber air minumnya. Hal ini dikarenakan sumber air minum sangat mempengaruhi kualitas air minumnya. Kualitas air yang dikonsumsi tubuh sangat erat kaitannya dengan kesehatan tubuh penghuninya.

Disamping itu, sumber sumber air minum yang digunakan penduduk juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan penduduk baik ditinjau dari segi kesehatan maupun keadaan ekonomi. Semakin banyak penduduk yang menggunakan air bersih bisa mengindikasikan bahwa kesehatan masyarakat semakin baik dan semakin banyak penduduk yang menggunakan air leding maupun air dalam kemasan sebagai sumber air minum sehari-hari mengindikasikan adanya peningkatan daya beli atau kesejahteraan rakyat.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Tabanan 2018 - 2020

Sumber Air Minum	2018	2019	2020
Leding Meteran/Eceran	24,58	25,69	28,76
Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	27,87	24,59	28,74
Mata Air Terlindung	34,81	25,55	28,52
Sumur Bor/Pompa	5,94	9,80	8,26
Sumur Terlindung	3,48	7,38	2,96
Mata Air Tidak Terlindung	2,85	4,86	2,41
Air Permukaan, Air Hujan	0,31	1,32	0,22
Sumur Tidak Terlindung	0,15	0,80	0,13
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

Sumber air minum yang sampai saat ini masih dianggap terbaik adalah air kemasan/isi ulang, karena sifatnya yang higienis. Pada tahun 2020 rumah tangga yang menggunakan leding meteran/eceran mencapai oleh 28,76 persen dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Tabanan. Penggunaan air

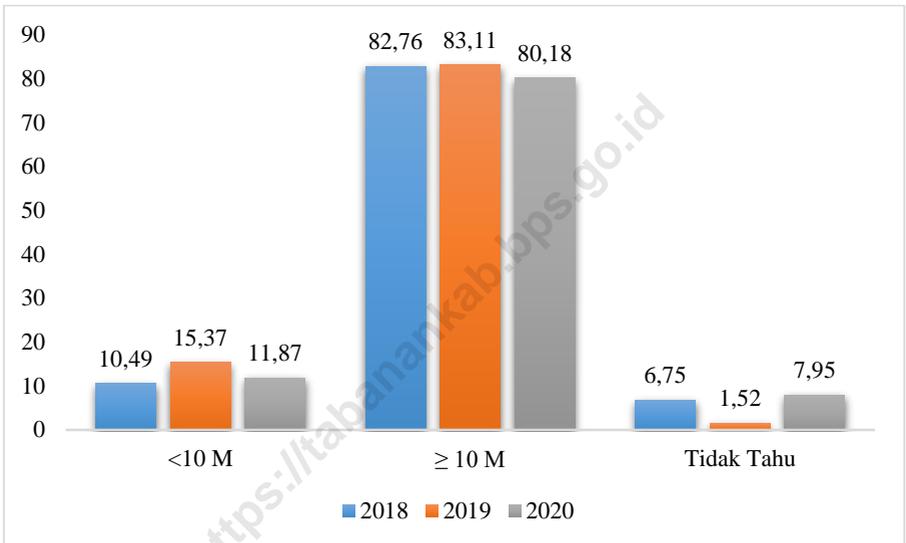


Perumahan

minum kemasan ini cukup tinggi dan persentasenya meningkat dalam dua tahun terakhir.

Sumber air untuk minum masyarakat Tabanan yang paling banyak digunakan bersumber dari ledeng meteran/eceran, yaitu sebesar 28,76 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi pergeseran dominasi sumber air minum dari mata air terlindung ke ledeng meteran/eceran. Penggunaan air mata terlindung berbeda tipis dengan ledeng meteran/eceran yaitu 28,52 persen. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan mata air terlindung di Tabanan cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, preferensi mayoritas masyarakat Tabanan merasa mata air terlindung lebih jernih dan ekonomis sehingga memutuskan beralih ke mata air terlindung. Bahkan, sumber mata air tidak terlindung pun juga mengalami penurunan dibanding sebelumnya, yaitu sebesar 2,41 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah agar pengelolaan mata air lebih diperhatikan karena mayoritas penduduk Tabanan lebih memilih sumber air minum jenis ini. Disamping itu, masih ada masyarakat Tabanan yang menggunakan air permukaan, air hujan, dan sumur tidak terlindung untuk minum. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi juga perlu mendapat perhatian agar ke depan sumber air minum yang bersih dan sehat dapat dinikmati seluruh masyarakat di Tabanan.

Grafik 6.4 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung/Tidak dan Mata Air Terlindung/Tidak menurut Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Kabupaten Tabanan 2018 - 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

Sebagai wilayah yang mayoritas masyarakatnya menggunakan mata air, harus dijaga kualitas air minumannya. Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari sumur juga harus memperhatikan adanya resapan air dari luar. Sedapat mungkin sumber air minum ini dijauhkan dari tempat penampungan akhir. Perlu diperhatikan lagi apakah sumber tersebut terlindung dari air limbah/bekas pakai, serta jarak terhadap pembuangan akhir/limbah apakah sudah memenuhi syarat. Sumber air minum yang tidak terlindung dari air limbah/bekas pakai dan jarak penampungan air kotor ataupun limbah yang terlalu dekat akan menyebabkan terjadinya



Perumahan

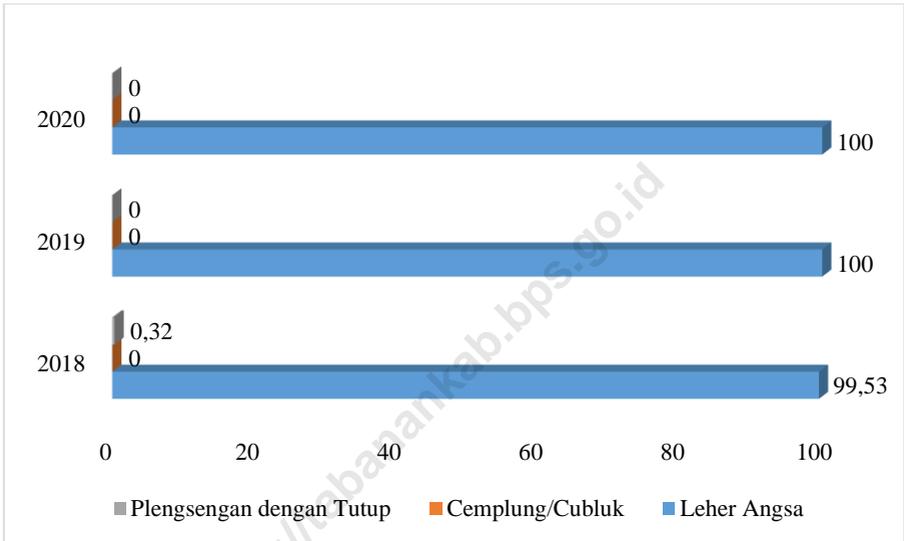
perembesan ke dalam sumber air minum. Bila terjadi perembesan maka akan mempengaruhi kualitas air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga. Oleh karena itu, jarak antara penampungan akhir dengan sumber air minum yang dianjurkan adalah lebih dari 10 meter.

Berdasarkan hasil Susenas, rumah tangga di Tabanan yang menggunakan air minum dari sumur atau mata air, sebagian besar telah memperhatikan kualitas air minum. Pada tahun 2020, persentase jarak pembuangan akhir dengan sumber air minum yang diatas 10 meter sebesar 80,18 persen. Bila memperhatikan Grafik 6.4, terjadi penurunan persentase rumah tangga yang menjaga kualitas sumber air minum untuk dikonsumsi, dimana pada tahun sebelumnya jarak pembuangan akhir dengan sumber air minum di atas 10 meter mencapai 83,11 persen. Hal ini perlu dikaji apakah perlu mengedukasi masyarakat terkait dampak letak sumber air minum terhadap lokasi pembuangan akhir.

6.6 Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas buang air besar (jamban) merupakan salah satu sarana pokok untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Tersedianya fasilitas yang memadai akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masing-masing individu. Oleh karena itu peningkatan jenis fasilitas buang air besar dan peningkatan wawasan masyarakat tentang pentingnya sarana ini harus terus disosialisasi secara intens.

Grafik 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Tabanan 2018 – 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

Berdasarkan Grafik 6.5 terlihat bahwa bahwa pada tahun 2020 fasilitas tempat buang air besar berjenis leher angsa sudah digunakan oleh seluruh rumah tangga di Kabupaten Tabanan, yaitu mencapai 100 persen, pada tahun 2019 sebesar 100 persen, dan tahun 2018 sebesar 99,53 persen. Sisanya menggunakan plengsengan dengan tutup. Fasilitas tempat buang air besar jenis leher angsa dianggap sebagai tempat buang air besar yang paling sehat, karena di bawahnya terdapat saluran berbentuk huruf “U” untuk menampung kotoran sehingga bau kotoran tidak keluar. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa hampir semua rumah tangga di Kabupaten Tabanan menggunakan fasilitas tempat buang air besar yang relatif sehat.

Perumahan

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Tabanan 2018 - 2020

Tempat Penampungan Akhir	2018	2019	2020
Tangki Septik	95,93	95,14	93,27
Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	3,28	2,88	3,33
SPAL/Pantai/Tanah Lapang/Kebun/Lainnya	0,16	1,98	3,40
Lubang Tanah	0,63	0,00	0
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

Selain jenis fasilitas tempat buang air besar, fasilitas perumahan berupa tempat penampungan akhir buang air besar juga erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan. Pada Tabel 6.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar rumah tangga menggunakan tangki septik sebagai tempat penampungan akhir buang air besar yaitu sebanyak 93,27 persen pada tahun 2020, 95,14 persen pada tahun 2019 dan 95,93 pada 2018. Tempat penampungan akhir tinja jenis tangki septik/tangki dengan dasar semen ini merupakan cara yang paling memenuhi persyaratan kesehatan. Oleh sebab itu, cara pembuangan tinja semacam ini yang dianjurkan. Sedangkan rumah tangga yang tempat penampungan akhir tinja pada kolam/sawah/sungai/danau/laut dan lubang tanah, persentasenya kecil yakni dibawah empat persen.

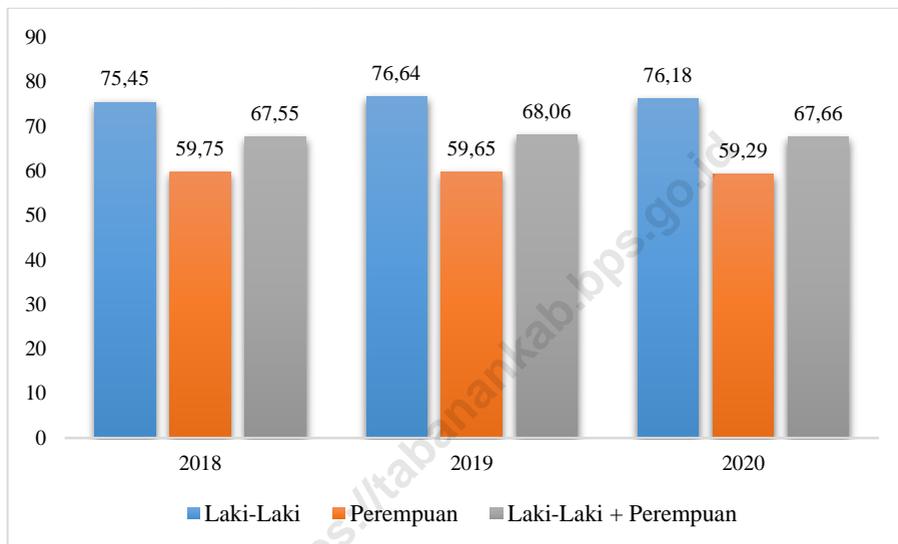
6.7 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi salah satu faktor pendorong globalisasi dan pesatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Kemajuan suatu bangsa di era teknologi informasi ini sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur dan kemudahan akses TIK. Infrastruktur TIK membantu konektivitas antar wilayah satu dengan wilayah lain secara cepat dan luas. Kemajuan di bidang teknologi informasi memberikan dampak positif bagi masyarakat. Apabila dikembangkan secara optimal, potensi TIK dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pembangunan nasional, TIK tidak hanya berarti pengembangan industri atau sektor TIK, tetapi juga mencakup penggunaan TIK yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik.

Salah satu perangkat TIK yang paling populer saat ini adalah telepon seluler. Perangkat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi telepon pintar. Kelebihan telepon pintar ini adalah kemampuannya dalam menjelajah sampai ruang tak terbatas untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Informasi yang bertebaran di dunia maya, banyak yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan. Akan tetapi juga tidak sedikit hal-hal negatif yang bisa merusak moral. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi perlu dilakukan secara selektif, agar tidak terjerumus kedalam pemanfaatan teknologi informasi yang tidak bertanggung jawab.

Perumahan

Grafik 6.6 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan 2018 – 2020

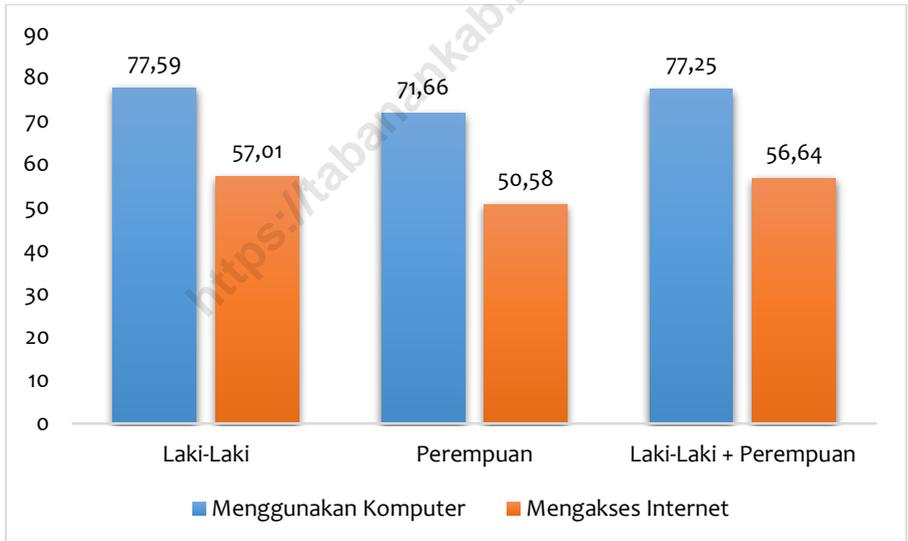


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kabupaten Tabanan yang menguasai/memiliki telepon seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir pada tahun 2020 sebanyak 67,66 persen. Komposisinya terdiri dari 76,18 persen penduduk laki-laki dan 59,29 persen penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan meskipun tidak terlalu besar. Dilihat menurut jenis kelamin, peningkatan penguasaan telepon seluler pada laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk laki-laki di Tabanan mulai banyak memanfaatkan teknologi untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Selain telepon seluler, penggunaan komputer juga mendukung kemajuan TIK di suatu wilayah. Di Kabupaten Tabanan, sebesar 77,25 persen sudah menggunakan komputer, terdiri dari 77,59 persen laki-laki dan 71,66 persen perempuan (lihat Grafik 6.7). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih dominan menggunakan komputer dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Grafik 6.7 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer dan Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Internet merupakan kependekan dari *interconnection networking*, yaitu jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan



Perumahan

milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya. Banyak fasilitas yang dapat didapatkan dari internet. Mulai dari informasi berupa berita, email, jejaring sosial, hiburan dan lain sebagainya.

Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kabupaten Tabanan yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir, pada tahun 2020 sebanyak 56,64 persen. Dilihat secara gender, penduduk laki-laki lebih dominan dalam akses internet dibanding perempuan.

<https://tabanankab.bps.go.id>

Bab VII

Sosial Ekonomi Lainnya

<https://tabanankab.bps.go.id>

7.1 Perlindungan Sosial

7.2 Tindak Kejahatan

INFOGRAFIS KESEJAHTERAAN RAKYAT BPS KABUPATEN TABANAN



Terdapat **2,98%** rumah tangga yang terdapat di Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 yang mendapatkan bantuan **Beras Sejahtera (Rastra)**



Terdapat **35,62%** rumah tangga yang terdapat di Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 yang menerima **Kredit Usaha**

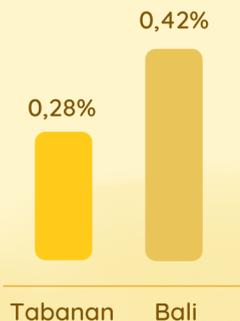


Terdapat **7,38%** rumah tangga yang terdapat di Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 yang menerima **Program Indonesia Pintar (PIP)**

SOSIAL EKONOMI LAINNYA

Persentase penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan selama tahun 2020 di Bali sebesar **0,42%**.

Sedangkan di Kabupaten Tabanan persentasenya lebih rendah yakni sebesar **0,28%**.



Sosial Ekonomi Lainnya

Isi dari bab ini mencakup beberapa informasi sosial ekonomi lainnya yang berkaitan dengan monitoring salah satu kebijakan pemerintah yaitu program perlindungan sosial. Informasi tersebut diantaranya mengenai pembelian atau penerimaan beras miskin, penerimaan kredit usaha penerimaan bantuan siswa miskin, kepemilikan aset, kepemilikan/penerimaan jaminan sosial, dan penerimaan kartu perlindungan sosial. Disamping itu, juga mencakup tentang kejadian yang dialami penduduk atas tindak kejahatan selama setahun terakhir, serta aktivitas penduduk yang melakukan kegiatan bepergian.

7.1 Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Suharto (2008) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Sosial Ekonomi Lainnya

Dalam upaya meningkatkan peran penduduk dalam pembangunan, pemerintah melakukan upaya perlindungan sosial, terutama bagi penduduk pada strata ekonomi kelas bawah (miskin), dalam bentuk pemberian beras murah/raskin, bantuan siswa miskin (BSM), kartu perlindungan sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tujuan pelaksanaan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok pangan dalam bentuk beras dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi atau harganya jauh lebih rendah dibanding harga pasar.

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Sejahtera (Rastra) dan Jumlah Beras yang Dibeli/Diterima di Kabupaten Tabanan, 2020

Uraian		Persentase Rumah Tangga
Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Rastra		2,98
Jumlah Beras yang Dibeli/ Diterima	<15 Kg	0,00
	15 – 29 Kg	5,18
	30 – 45 Kg	94,83
	>45 Kg	0,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Sosial Ekonomi Lainnya

Persentase rumah tangga di Kabupaten Tabanan yang pernah menerima bantuan sosial beras sejahtera (rastra) sebesar 2,98 persen. Sebagian besar rumah tangga sasaran membeli/menerima raskin 30-45 kg, yaitu sebesar 94,82 persen. Sisanya, menerima raskin dibawah 30 kg, dimana rumah tangga penerima raskin 15 – 29 kg sebanyak 5,18 persen.

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Kredit Usaha di Kabupaten Tabanan 2020

Uraian		Persentase Rumah Tangga
Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha		35,62
Jenis Kredit Usaha	KUR	27,05
	Bank Umum selain KUR	17,02
	BPR	15,43
	Koperasi	24,04
	Perorangan dengan Bunga	6,57
	Pegadaian	1,06
	Perusahaan Leasing	7,75
	KUBE/KUB	1,34
	BUMDes	6,97
	Lainnya	8,25

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerintah mencanangkan program pemberian kredit usaha untuk masyarakat ekonomi lemah dengan

Sosial Ekonomi Lainnya

syarat-syarat tertentu. Pemberian kredit tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan modal usaha skala kecil. Persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha di Kabupaten Tabanan ada sebanyak 35,62 persen. Menurut jenisnya, kredit usaha yang banyak diterima rumah tangga di Tabanan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ada beberapa macam kredit usaha yang diterima oleh rumah tangga tersebut, yaitu jenis kredit usaha yang berasal dari Kredit Usaha Rakyat/KUR (27,05 persen), program koperasi (24,04 persen), kredit dari bank umum selain KUR (17,02 persen), kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (15,43 persen), kredit lainnya (8,25 persen), kredit dari perusahaan *leasing* (7,75 persen), kredit dari Badan Usaha Milik Desa/BUMDES (6,97 persen), kredit perorangan dengan bunga (6,57 persen), kredit Kelompok Usaha Bersama/KUBE (1,34 persen), dan kredit pegadaian (1,06 persen). Secara lengkap, kredit usaha yang diterima oleh rumah tangga penerima kredit usaha dari pemerintah, ditunjukkan oleh Tabel 7.2.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah juga mencanangkan berbagai macam perlindungan, salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP). PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tujuan PIP adalah untuk meningkatkan akses agar penerima bantuan mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat wajib belajar 12 tahun. Selain itu, PIP bertujuan

Sosial Ekonomi Lainnya

mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Menurut Jenis PIP yang Diterima di Kabupaten Tabanan, 2020

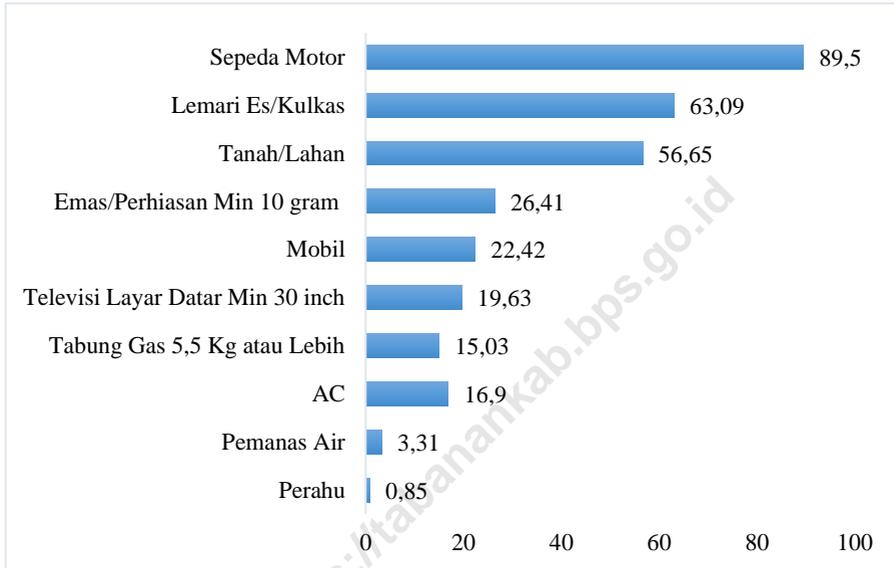
Uraian		Persentase
Rumah Tangga yang Menerima PIP		7,38
Jenis PIP	PIP SD Sederajat	55,67
	PIP SMP Sederajat	36,11
	PIP SMA Sederajat	27,44

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Sebanyak 7,38 persen rumah tangga di Kabupaten Tabanan telah menerima PIP. Dari angka tersebut, PIP diterima oleh sebagian besar siswa SD, yaitu 55,67 persen. Sisanya, diterima oleh siswa SMP 36,11 persen dan siswa SMA 27,44 persen. Program PIP dari segi anggaran memang paling besar untuk jenjang SD sehingga wajar apabila mayoritas penerima PIP adalah siswa SD.

Sosial Ekonomi Lainnya

Grafik 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kepemilikan Aset di Kabupaten Tabanan, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat diperoleh dari Susenas adalah variabel kepemilikan aset. Variabel ini dapat melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga secara kasat mata. Semakin besar persentase rumah tangga yang memiliki aset, semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah.

Hampir semua rumah tangga di Tabanan memiliki sepeda motor dan sebanyak 22,42 persen rumah tangga memiliki mobil sebagai sarana transportasi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dilihat dari persentase kepemilikan aset, terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di

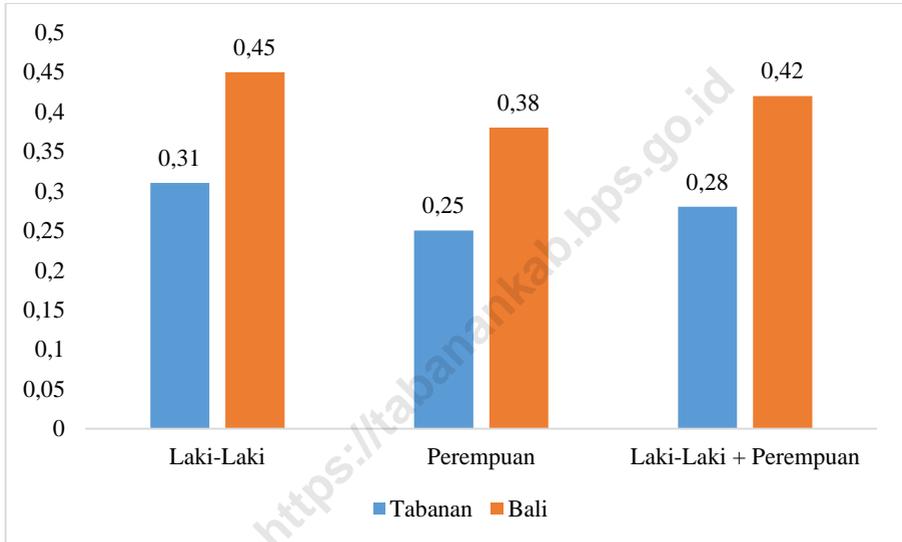
Tabanan cukup tinggi. Kepemilikan tanah/lahan mencapai 56,65 persen, lemari es/kulkas sebanyak 63,09 persen, dan emas/perhiasan minimal 10 gram sebanyak 26,41 persen. Sementara itu, persentase paling sedikit berada pada kepemilikan perahu dimana hanya 0,85 persen masyarakat yang memilikinya. Hal ini wajar mengingat wilayah Tabanan tidak terdapat pelabuhan maupun penyeberangan.

7.2 Tindak Kejahatan

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki slogan TABANAN SERASI, yang kepanjangannya yakni Tabanan yang sejahtera, aman, dan berprestasi. Dari slogan tersebut memperlihatkan bahwa keamanan merupakan bidang utama yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam menyusun dan mengevaluasi pembangunan di bidang keamanan, memerlukan dukungan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan.

Rasa aman merupakan variabel yang sulit diukur, karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, misalnya dimensi politik, sosial, dan ekonomi. Susenas mengukur rasa aman masyarakat melalui variabel angka kriminalitas. Semakin tinggi kriminalitas, menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat semakin tidak aman. Sebaliknya, angka kriminalitas yang rendah menunjukkan bahwa masyarakat semakin aman dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Grafik 7.2 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan dalam Periode 1 Januari - 31 Desember 2020 menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabanan, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Pada umumnya di Bali tindak kejahatan dalam masyarakat, relatif lebih rendah bila dibandingkan daerah lain di Indonesia. Persentase penduduk yang mendapat perlakuan tindak kejahatan hanya sebesar 0,42 persen. Sedangkan di Tabanan persentase ini lebih rendah lagi yang hanya 0,28 persen. Baik di Bali maupun Tabanan, tindak kejahatan lebih sering dialami penduduk laki-laki dibanding perempuan.

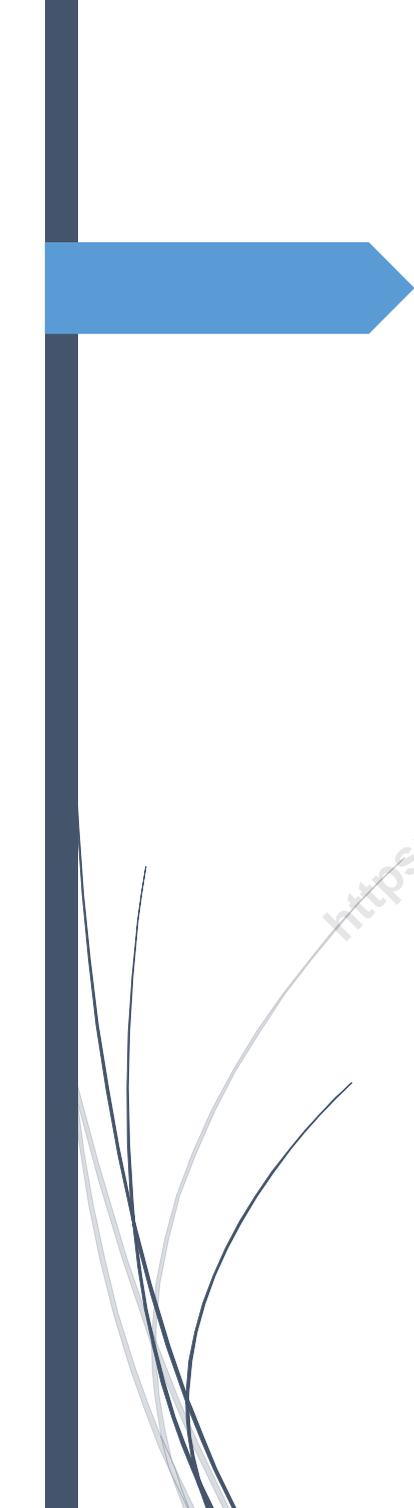


Sosial Ekonomi Lainnya

Walaupun tingkat kejahatan baik di Bali maupun Tabanan relatif rendah, kejahatan tetaplah perbuatan kriminal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Pemerintah Kabupaten Tabanan harus tetap menjamin masyarakat dalam keadaan aman sesuai slogannya, mengingat kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari si pelaku kejahatan, tetapi juga karena ada kesempatan. Banyak faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan dalam masyarakat. Kemiskinan, kesenjangan sosial dan kesulitan ekonomi sering menjadi alasan pelaku untuk melakukan aksi kejahatan.

<https://tabanankab.bps.go.id>

<https://tabanankab.bps.go.id>



Daftar Pustaka

<https://tabanankab.bps.go.id>



Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan*, Jakarta : Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas
- Badan Pusat Statistik dan UNDP, 1997, *Ringkasan Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 1996*, Jakarta : BPS-RI.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan, 2021, *Tabanan Dalam Angka Tahun 2021*, Tabanan : BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan, 2020, *Tabanan Dalam Angka Tahun 2020*, Tabanan : BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan, 2019, *Tabanan Dalam Angka Tahun 2019*, Tabanan : BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali 2019*, Denpasar: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali 2019*, Denpasar: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2018, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali 2018*, Denpasar: BPS



<https://kebanankab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TABANAN**



-  Jl. Pahlawan No 1B Tabanan, 82113
-  <https://tabanankab.bps.go.id>
-  bps5102@bps.go.id
-  (0361) 811571, Fax (0361) 814967

ISBN 978-602-1359-87-7



9 786021 359877 >